

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGELUARAN 2016-2020



BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SABANG

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA SABANG MENURUT PENGELUARAN 2016-2020

Gross Regional Domestic Product of Sabang Municipality By Expenditure 2016-2020

Nomor Katalog BPS/BPS Catalog Number : 9302023.1172

Nomor Publikasi/Publication Number : 11720.2105

Ukuran Buku/Book Size : 21 cm x 29 cm

Jumlah Halaman/Total Page : xii + 72 hal

**Naskah/Manuscript :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Section of Regional Account and Statistical Analysis**

**Gambar Kulit/Cover Picture :
Canva.com
Freepik.com
Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Section Integration Processing and Dissemination of Statistics**

**Diterbit Oleh/Published by :
Badan Pusat Statistik Kota Sabang
BPS-Statistics Indonesia of Sabang Municipality**

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya
May be cited with reference to the source

<https://sabangkota.bps.go.id>

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KOTA SABANG MENURUT PENGELUARAN
2016-2020**

***Gross Regional Domestic Product of Sabang
Municipality By Expenditure 2016-2020***

Tim Penyusun/*Drafting Team*

Pengarah/*Director* : Ir. Maimun

Editor/*Editor* : Uun Malihan Hawa, SST

Penulis/*Writer* : Uun Malihan Hawa, SST

Pengolah data/*Data Processor* : Uun Malihanhawa, SST

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Sabang menurut Pengeluaran tahun 2016-2020 ini merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Sabang. Sebagai kelanjutan dari publikasi sebelumnya, publikasi ini menyajikan tinjauan tentang perkembangan ekonomi makro Kota Sabang dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh PBB.

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi pengguna data dan penghargaan disampaikan kepada tim yang telah berhasil menyusun publikasi ini dengan tepat waktu. Selanjutnya saran dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan publikasi ini pada periode mendatang.

Sabang, April 2021
Kepala BPS Kota Sabang,

Ir. Maimun

PREFACE

Gross Regional Domestic Product (GRDP) is one of the economic data tools that can be used to evaluate the economic development performance of a region (province or district/city). This data tool can also be used for other purposes and purposes, such as the basis for developing economic models in order to formulate policy formulations, the level of velocity of money, financial deepening, taxation, export studies and import and so on.

The publication of Gross Regional Domestic Product (GRDP) of Sabang City by Expenditure 2016-2020 is an annual publication issued by the Statistics of Sabang City. As a continuation of the previous publication, this publication presents an overview of the macroeconomic development of Sabang City in the last five years (2016-2020). GRDP data in this publication and subsequent publications use the 2010 base year, and have adopted the 2008 System of National Accounts concept as recommended by the United Nations.

Hopefully this publication will be useful for data users and the award will be delivered to the team who have successfully compiled this publication on time. Furthermore, suggestions from various parties are expected to improve this publication in the coming period.

*Sabang, April 2021
Chief BPS-Statistics of Sabang
Municipality,*

Ir. Maimun

DAFTAR ISI

CONTENTS

KATA PENGANTAR	v
PREFACE	vi
DAFTAR ISI	vii
CONTENTS	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
I. PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2 Pengertian PDRB, Agregat PDRB dan Tahun Dasar	4
1.3 Manfaat dan Implikasi Perubahan Tahun Dasar 2010.....	6
1.4 Perubahan Klasifikasi dari PDRB Tahun Dasar 2000 ke PDRB Tahun Dasar 2010....	8
1.5 Kegunaan	9
II. METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA.....	13
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	13
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT.....	17
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	20
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	23
2.5 Perubahan Inventori	28
2.6 Ekspor Impor	32
III. TINJAUAN PEREKONOMIAN BERDASARKAN PDRB MENURUT PENGELUARAN.....	37
3.1 Tinjauan Agregat PDRB Menurut Pengeluaran	37
3.1.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010	37
3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi	38
3.1.3 Distribusi Persentase PDRB Menurut Pengeluaran	40
3.1.4 Indeks Harga Implisit dan Laju Indeks Harga Implisit	41
3.2 Konsumsi Rumah Tangga	43
3.2.1 Distribusi Persentase ADHB	43
3.2.2 Laju Pertumbuhan	44
3.2.3 Laju Indeks Implisit	46
3.2.4 Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	47
3.3 Konsumsi Lembaga Non-profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT)	49
3.4 Konsumsi Pemerintah.....	50
3.5. Pembentukan Modal Tetap Bruto.....	52
IV. PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGGUNAAN.....	55

4.1 PDRB Perkapita	55
4.2 Perbandingan Konsumsi Pemerintah Terhadap PMTB	56
4.3 Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB	57
V. PENUTUP	60
LAMPIRAN	64
DAFTAR PUSTAKA.....	71

<https://sabangkota.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Produk Domestik Regional Bruto ADHB Menurut Pengeluaran (Triliun Rupiah), 2016-2020	37
Gambar 3. 2 Produk Domestik Regional Bruto ADHK 2010 Menurut Pengeluaran (Triliun Rupiah), 2016-2020	38
Gambar 3. 3 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Komponen Pengeluaran (Persen), 2016-2020	39
Gambar 3. 4 Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (Persen), 2016-2020	41
Gambar 3. 5 Indeks Harga Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, 2016-2020....	42
Gambar 3. 6 Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Menurut Pengeluaran (Persen), 2016-2020	42
Gambar 3. 7 Distribusi Persentase Komponen Konsumsi Rumah Tangga ADHB	43
Gambar 3. 8 Distribusi Persentase Subkomponen Konsumsi Rumah Tangga ADHB (Persen), 2016-2020	44
Gambar 3. 9 Laju Pertumbuhan Komponen Konsumsi Rumah Tangga ADHK 2010 (persen), 2016-2020	45
Gambar 3. 10 Nilai Komponen Konsumsi Rumah Tangga Perkapita ADHB (Juta Rupiah), 2016-2020	47
Gambar 3. 11 Laju Pertumbuhan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Perkapita ADHB (Persen), 2016-2020	48
Gambar 3. 12 Distribusi Persentase Komponen Konsumsi LNPRT ADHB	49
Gambar 3. 13 Laju Pertumbuhan Komponen Konsumsi LNPRT ADHK 2010 (Persen), 2016-2020	50
Gambar 3. 14 Distribusi Persentase Komponen Konsumsi Pemerintah ADHB (Persen), 2016-2020	51
Gambar 3. 15 Laju Pertumbuhan Komponen Konsumsi Pemerintah ADHK 2010 (Persen), 2016-2020	51
Gambar 3. 16 Distribusi Persentase Komponen PMTB ADHB (Persen), 2016-2020	52
Gambar 3. 17 Laju Pertumbuhan Komponen PMTB ADHK 2010 (Persen), 2016-2020	53

Gambar 4. 1 Nilai PDRB Perkapita ADHB (Juta Rupiah), 2016-2020	55
Gambar 4. 2 Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHB (Persen), 2016-2020...	55
Gambar 4. 3 Nilai Komponen Konsumsi Pemerintah dan PMTB ADHB (Trilliun Rp), 2016-2020	56
Gambar 4. 4 Rasio Komponen Konsumsi Pemerintah Terhadap PMTB, 2016-2020	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 5 Nilai Komponen Konsumsi Akhir (Trilliun Rp), 2016-2020	57
Gambar 4. 6 Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB (Persen), 2016-2020	57

<https://sabangkota.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha .	8
Tabel 1. 2 Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010	9
Tabel 3. 1 Laju Pertumbuhan Komponen Konsumsi Rumah Tangga ADHK 2010-2015	
Tabel 3. 2 Laju Pertumbuhan Indeks Implisit Komponen Konsumsi Rumah Tangga (Persen), 2016-2020	47
Tabel 3. 3 Nilai ADHB (Miliar Rupiah) dan Kontribusi Net Ekspor (Persen), 2016-2020	Error! Bookmark not defined.

<https://sabangkota.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (juta rupiah), 2016-2020	64
Lampiran 2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (juta rupiah), 2016-2020	65
Lampiran 3 Distribusi Persentase Pengeluaran Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (persen), 2016-2020	66
Lampiran 4 Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (2010 = 100), 2016-2020	76
Lampiran 5 Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran (2010 = 100), 2016-2020.....	77
Lampiran 6 Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran (persen), 2016-2020.....	78

<https://sabangkota.bps.go.id>

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Informasi perkembangan perekonomian sangat diperlukan untuk menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi kinerja pemerintahan. Salah satu data statistik yang dibutuhkan untuk kegiatan perencanaan dan evaluasi ekonomi makro adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan tersedianya data PDRB, strategi dan kebijaksanaan pembangunan perekonomian yang telah diambil pemerintah dapat dievaluasi, dan diperbaiki atau dilanjutkan di masa mendatang.

Hakekat pembangunan ekonomi adalah serangkaian kegiatan usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk:

- a. Peningkatan taraf hidup masyarakat.
- b. Perluasan kesempatan kerja.
- c. Pemerataan pembagian pendapatan masyarakat.
- d. Peningkatan hubungan ekonomi regional.
- e. Pergeseran ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

Dengan kata lain arah pembangunan ekonomi adalah mengusahakan pendapatan masyarakat naik dengan distribusi yang semakin merata.

Kemudian untuk mengetahui tingkat pertumbuhan pendapatan masyarakat suatu wilayah perlu disajikan pendapatan regional secara berkala yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan regional/daerah khususnya di bidang ekonomi. Angka Pendapatan Regional atau PDRB merupakan suatu indikator berupa data agregat yang dapat dipakai untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

I. INTRODUCTION

1.1. Background

Information on economic development is needed to plan and conduct government performance evaluations. One of the statistical data needed for macroeconomic planning and evaluation activities is Gross Regional Domestic Product (GRDP). With the availability of GRDP data, the economic development strategies and policies that the government has taken can be evaluated, and improved or continued in the future.

The essence of economic development is a series of business activities and policies that aim to:

- a. *Improving the standard of living of the community.*
- b. *Expansion of employment opportunities.*
- c. *Equitable distribution of community income.*
- d. *Increasing regional economic relations.*
- e. *Economic shift from the primary sector to the secondary and tertiary sectors.*

In other words, the direction of economic development is to strive to increase people's income with an even distribution.

Then to find out the level of income growth of a region's people need to be presented periodically regional income that can be used as regional/regional development planning material, especially in the economic field. Regional Income Figures or GRDP is an indicator in the form of aggregate data that can be used to measure the level of economic growth of a region.

Sementara itu dalam beberapa buku referensi ditegaskan bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh faktor permintaan daripada penyediaan. Perkembangan yang terjadi sebagai akibat dari perubahan gaya hidup dan perilaku konsumsi dari sebagian masyarakat modern telah mendorong produsen untuk meningkatkan produksinya baik secara kuantitas maupun kualitas, yang pada akhirnya mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian dibutuhkan parameter untuk memantau perkembangan permintaan atau konsumsi masyarakat luas.

1.2 Pengertian PDRB, Agregat PDRB dan Tahun Dasar

PDRB merupakan neraca makro ekonomi yang dihitung secara konsisten dan terintegrasi berdasarkan konsep, definisi, klasifikasi dan cara penghitungan yang telah disepakati secara Internasional. Tujuan menghitung PDRB adalah untuk mengetahui total produksi barang dan jasa pada suatu wilayah selama kurun waktu tertentu.

Nilai PDRB adalah nilai tambah dari total produksi tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan produksi adalah aktifitas ekonomi yang menggunakan sumber daya yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa.

Perubahan nilai PDRB dari waktu ke waktu terjadi karena dua hal, yaitu terjadinya perubahan harga barang dan jasa atau karena terjadinya perubahan volume. Karenanya ada dua jenis nilai PDRB disajikan yakni berdasarkan harga konstan dan berdasarkan harga berlaku.

Meanwhile in some reference books it is emphasized that development and economic growth are more determined by factors of demand than supply. The development that occurs as a result of changes in lifestyle and consumption behavior of some modern societies has encouraged producers to increase their production both in quantity and quality, which in turn encourages development and economic growth. Thus, a parameter is needed to monitor the development of demand or consumption of the wider community.

1.2 Definition of GRDP, GRDP Aggregate and Base Year

GRDP is a macroeconomic balance that is calculated consistently and integrated based on the internationally agreed concept, definition, classification and calculation method. The purpose of calculating GRDP is to find out the total production of goods and services in an area for a certain period of time.

GRDP value is the added value of the total production. Whereas what is meant by production is economic activity that uses available resources to produce goods and services.

Changes in GRDP value from time to time occur because of two things, namely the change in the price of goods and services or due to changes in volume. Therefore there are two types of GRDP values presented based on constant prices and based on current prices.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Sejalan dengan pergeseran tahun dasar Produk Domestik Bruto (PDB) yang dilakukan dalam lingkup nasional, BPS Provinsi Aceh juga melakukan pergeseran tahun dasar PDRB dari tahun 2000 ke tahun 2010. Keseragaman tahun dasar PDRB dan PDB memungkinkan pengguna data dapat melakukan perbandingan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, demikian juga perbandingan antar daerah.

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara Tiongkok-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT).

Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan.

Gross Regional Domestic Product (GRDP) based on current prices or known as nominal GRDP is compiled based on the prices prevailing in the accounting period, and aims to see the structure of the economy. Whereas GRDP on the basis of constant prices is arranged based on prices in the base year and aims to measure economic growth.

In line with the shift in the base year of the Gross Domestic Product (GDP) carried out in the national scope, the BPS of the Province of Aceh also made a shift in the GRDP base year from 2000 to 2010. The uniformity of the basic year of GRDP and GDP allows data users to compare national and regional economic growth, as well as regional comparisons.

Over the past ten years, many changes have taken place in the global and local order which have a profound effect on the national economy. The global financial crisis that occurred in 2008, the implementation of free trade between China-ASEAN (CAFTA), changes in the international trade recording system and the expansion of capital market services are examples of changes that need to be adapted in the national statistical recording mechanism.

One form of adaptation to national statistical records is to change the year of Indonesia's GDP base from 2000 to 2010. Changes in the base year of GDP are carried out in line with adopting the United Nations (UN) recommendations contained in the 2008 System of National Accounts (SNA2008) through the preparation of a Supply framework and Use Tables (SUT).

Changes to the base year of GDP are carried out simultaneously with the calculation of the Province's Gross Regional Domestic Product (GRDP) to maintain consistency in the results of calculations.

SNA 2008 merupakan standar rekomendasi internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur *item* tertentu seperti PDRB.

SNA dirancang untuk menyediakan informasi tentang aktivitas pelaku ekonomi dalam hal produksi, konsumsi dan akumulasi harta dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan analisis, pengambilan keputusan, dan pembuatan kebijakan. Dengan menggunakan Kerangka SNA, fenomena ekonomi dapat dengan lebih baik dijelaskan dan dipahami.

1.3 Manfaat dan Implikasi Perubahan Tahun Dasar 2010

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB antara lain :

- Menginformasikan perekonomian regional yang terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Meningkatkan kualitas data PDRB;
- Menjadikan data PDRB dapat diperbandingkan secara internasional.

Pergeseran harga tahun dasar akan memberikan beberapa dampak antara lain:

- Meningkatkan nominal PDRB, yang pada gilirannya akan berdampak pada pergeseran kelompok pendapatan suatu daerah dari pendapatan rendah, menjadi menengah, atau tinggi dan pergeseran struktur perekonomian;
- Akan merubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan saving, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi;

The 2008 SNA is a standard international recommendation on how to measure economic activity in accordance with conventional calculations based on economic principles. The recommendations referred to are expressed in a set of concepts, definitions, classifications, and balance sheet rules that are agreed internationally in measuring certain items such as GRDP.

SNA is designed to provide information about the activities of economic actors in terms of production, consumption and accumulation of assets and can be used for the benefit of analysis, decision making, and policy making. By using the SNA Framework, economic phenomena can be better explained and understood.

1.3 Changes in Benefits and Implications of the 2010 Basic Year

The benefits of changes in GRDP base year include:

- *Inform the latest regional economies such as shifting structures and economic growth;*
- *Improve the quality of GRDP data;*
- *Making GRDP data comparable internationally.*

Shifting the price of the base year will have several impacts, including:

- *Increase nominal GRDP, which in turn will have an impact on shifting income groups in an area from low income, to medium, or high and a shift in the structure of the economy;*
- *Will change the magnitude of macro indicators such as tax ratios, debt ratios, investment and saving ratios, current account values, structure and economic growth;*

- Akan menyebabkan perubahan pada input data untuk *modeling* dan *forecasting*.

Will cause changes in data input for modeling and forecasting.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan tahun dasar secara berkala sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut:

The Central Statistics Agency (BPS) has periodically changed the base year 5 (five) times, namely in 1960, 1973, 1983, 1993 and 2000. The year 2010 was chosen as the new base year replacing the 2000 base year for the following reasons:

- Perekonomian Indonesia tahun 2010 relatif stabil;
 - Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama dibidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru;
 - Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun¹;
 - Adanya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, sumber data dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA2008;
 - Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) dan Indeks harga Produsen (*Producers Price Index/PPI*);
 - Tersedianya kerangka kerja SUT yang menggambarkan keseimbangan aliran produksi dan konsumsi (barang dan jasa) dan penciptaan pendapatan dari aktivitas produksi tersebut.
- *Indonesia's economy in 2010 was relatively stable;*
 - *There has been a change in the economic structure over the last 10 (ten) years, especially in the field of information and technology and transportation which has an influence on distribution patterns and the emergence of new products;*
 - *UN recommendations regarding the replacement of the base year every 5 (five) or 10 (ten) years;*
 - *There is a renewal of the concept, definition, classification, scope, data source and methodology according to the recommendations in SNA2008;*
 - *Availability of new data sources for improvement of GRDP such as 2010 Population Census data (SP 2010) and Producers Price Index (PPI);*
 - *Availability of an SUT framework that describes the balance of production and consumption flows (goods and services) and the creation of income from these production activities.*

1.4 Perubahan Klasifikasi dari PDRB Tahun Dasar 2000 ke PDRB Tahun Dasar 2010

Klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 (2000=100) menggunakan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 1990 (KLUI 1990) sedangkan pada PDRB tahun dasar 2010 (2010=100) menggunakan KBLI 2009. Perbandingan keduanya pada tingkat paling agregat dapat dilihat pada tabel berikut:

1.4 Changes in Classification from GRDP in the 2000 Basic Year to GRDP in the 2010 Basic Year

The GRDP classification according to the 2000 base year business field (2000=100) uses the Indonesian Business Field Classification 1990 (KLUI 1990) while in the 2010 base year GRDP (2010=100) uses KBLI 2009. The comparison of the two at the most aggregate level can be seen in the following table:

Tabel 1. 1 Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2000 dan 2010
Table 1. 1 Comparison of Changes in GRDP Classification by Business Field 2000 and 2010 Base Year

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian	B. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan	C. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	D. Pengadaan Listrik dan Gas
	E. Pengadaan Air
5. Konstruksi	F. Konstruksi
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
7. Pengangkutan dan Komunikasi	H. Transportasi dan Pergudangan
	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
	J. Informasi dan Komunikasi
8. Keuangan, Real estat, dan jasa perusahaan	K. Jasa Keuangan
	L. Real Estat
	M,N. Jasa Perusahaan
9. Jasa-jasa	O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
	P. Jasa Pendidikan
	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
	R,S,T,U. Jasa Lainnya

Sementara klasifikasi PDRB menurut pengeluaran tahun dasar 2010 secara garis besar tidak banyak mengalami perubahan seperti tabel berikut:

While the classification of GRDP according to expenditure in the 2010 base year in general does not experience much change like the following table:

Tabel 1. 2 Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010
Table 1. 2 Comparison of Changes in GRDP Classification by Expenditure in 2000 and 2010

PDRB Tahun Dasar 2000		PDRB Tahun Dasar 2010	
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga
2.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4.	Perubahan Inventori	4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto
5.	Ekspor	5.	Perubahan Inventori
6.	Impor	6.	Ekspor
		7.	Impor

1.5 Kegunaan

Kegunaan dari penyusunan publikasi PDRB Provinsi Aceh 2015-2019 menurut pengeluaran adalah:

1. Untuk menyatakan komposisi penggunaan barang dan jasa baik yang dihasilkan dalam daerah maupun yang berasal dari daerah lain termasuk impor dari luar negeri, untuk memenuhi permintaan antara lain sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga
 - b. Pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba
 - c. Pengeluaran konsumsi pemerintah
 - d. Pembentukan modal tetap bruto
 - e. Perubahan inventori
 - f. Ekspor neto, yaitu ekspor dikurang impor.
2. Mengetahui dan mempelajari fenomena, tatanan maupun perilaku ekonomi makro berbagai pelaku ekonomi seperti perilaku konsumsi masyarakat, pemerintah dan investasi (fisik).
3. Mengetahui informasi tentang surplus atau defisitnya neraca perdagangan barang dan jasa dengan daerah lain.
4. Penyajian angka pendapatan regional atas dasar harga konstan akan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah, baik secara menyeluruh maupun sektoral.

1.5 Purpose

The usefulness of the preparation of the 2015-2019 Provincial Province PDRB publication according to expenditure is:

1. *To declare the composition of the use of goods and services produced both within the region and those from other regions, including imports from abroad, to fulfill the following requests:*
 - a. *Household consumption expenditure*
 - b. *Consumption of private non-profit institutions*
 - c. *Government consumption expenditure*
 - d. *Gross fixed capital formation*
 - e. *Inventory changes*
 - f. *Net exports, namely exports reduced by imports.*
2. *Knowing and studying the phenomenon, order and macroeconomic behavior of various economic actors such as the consumption behavior of society, government and investment (physical).*
3. *Knowing information about the surplus or deficit in the trade balance of goods and services with other regions.*
4. *Presentation of regional income figures on the basis of constant prices will show the economic growth rate of a region, both thoroughly and sectorally.*

5. Nilai pendapatan atau PDRB per kapita secara makro dapat digunakan dalam melakukan analisis perbandingan tingkat kemakmuran suatu daerah dengan daerah lain, serta peningkatannya setiap tahun.
6. Penyajian pendapatan regional atas dasar harga berlaku bersama-sama dengan harga konstan dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat tingkat inflasi/deflasi setiap tahunnya.
7. Sebagai bahan masukan bagi pembuat kebijakan di bidang perekonomian daerah.

5. *Value of income or GRDP per capita on a macro basis can be used in comparing analysis of the level of prosperity of an area with other regions, as well as increasing each year.*
6. *Presentation of regional income at current prices together with constant prices can be used as an indicator to see the rate of inflation / deflation every year.*
7. *As input for policy makers in the regional economy.*

<https://sabangkota.bps.go.id>

II. METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi

II. ESTIMATION AND SOURCES OF DATA METHODS

2.1 Household Final Consumption Expenditures

The household sector has a significant role in the economy. This is reflected in the large contribution of household consumption in the formation of expenditure GRDP. Besides acting as the final consumer of goods and services, households also act as producers and providers of production factors for production activities carried out by other institutional sectors.

Household final consumption expenditure (PKRT) is expenditure on goods and services by households for consumption purposes. Households are defined as individuals or groups of individuals who live together in a residential building. They collect income, can have assets and obligations, and consume goods and services together, especially food and housing groups.

Household final consumption expenditure covers all expenditures on goods and services by residents of a region, whether done inside or outside the domestic territory of a region. The types of goods and services consumed are classified according to the COICOP (Classifications of Individual Consumption by Purpose) as recommended by the United Nations (UN), as follows:

1. *Non-alcoholic food and beverages*
2. *Alcoholic, tobacco and narcotics drinks*
3. *Clothing and foot equipment*
4. *Housing, water, electricity, gas and other fuels*
5. *Furniture, household supplies and routine maintenance*
6. *Health*
7. *Transport*
8. *Communication*

9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
 10. Pendidikan
 11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
 12. Barang dan jasa lainnya
- Namun karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:
1. Makanan, Minuman, dan Rokok
 2. Pakaian dan Alas Kaki
 3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
 4. Kesehatan dan Pendidikan
 5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
 6. Hotel dan Restoran
 7. Lainnya
- Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sbb:
- a. Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
 - b. Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
 - c. Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri.
 - d. Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain.
 - e. Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor).

9. *Recreation / entertainment and culture*
 10. *Education*
 11. *Provision of food and drinks / lodging*
 12. *Other goods and services*
- However, due to limited data, the 12 COICOPs were regrouped to become only 7 COICOPs, namely:*
1. *Food, Drinks and Cigarettes*
 2. *Clothing and Footwear*
 3. *Housing, Tools, Equipment and Household Operations*
 4. *Health and Education*
 5. *Transportation, Communication, Recreation and Culture*
 6. *Hotels and Restaurants*
 7. *Others*

Household consumption includes the following:

- a. *Imputation of owner occupied dwellings services;*
- b. *Estimated value of self-owned house rental must be taken into account because the owner's household is considered to produce a house rental service for himself. Imputation of house rent is estimated based on market prices, even though the status of the house is self-owned. If the household actually rents, then what is calculated is the rental fee paid, either full or not paid because it gets a fee (subsidy or transfer).*
- c. *Goods produced and used alone.*
- d. *Giving / gifts in the form of items received from other parties.*
- e. *Goods and services purchased directly (direct purchase) by residents outside the region or abroad (treated as imports).*

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- a. Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut).
- b. Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- c. Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- d. Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah:

- a. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- b. Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- c. Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu,
- d. Indeks Harga Konsumen (IHK).

There are several notes that need to be known regarding this household final consumption expenditure, namely:

- a. Direct purchase by non-residents is treated as an export from the region).*
- b. Purchases of goods that are not reproduced (duplicated), such as antiques, paintings, and other works of art are treated as investments in valuables, not household consumption.*
- c. Household expenditures for intermediate costs and capital formation in household business activities are not included in household consumption expenditure. For example, the purchase of goods and services for business purposes, large repairs of houses, and home purchases.*
- d. Expenditures for the purpose of transfer in the form of money or goods are not included as household consumption expenditure.*

The data sources used to estimate household final consumption expenditure are:

- a. The BPS National Socio-Economic Survey (Susenas), in the form of per-capita consumption expenditure a week for food, and per-capita expenditure a month for non-food groups,*
- b. Mid-year population,*
- c. Secondary data (from BPS or from outside BPS), in the form of data or indicators of commodity supply and certain types of expenditure,*
- d. Consumer Price Index (CPI).*

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas. Akan tetapi, karena hasil estimasi data pengeluaran rumah tangga yang berasal dari Susenas cenderung *underestimate* (terutama untuk kelompok bukan makanan dan kelompok makanan jadi), maka perlu dilakukan penyesuaian (*adjustment*).

Dalam melakukan *adjustment*, digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator *supply* dari berbagai sumber data di luar Susenas. Setelah diperoleh hasil *adjustment*, maka yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan pada data sekunder. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Hal ini dilakukan karena hasil penghitungan dari data sekunder dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sbb:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu $\times (30/7) \times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan $\times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Data poin ke 1 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas yang mungkin dikontrol secara tersendiri;
3. Terhadap data poin ke 3 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu;

Household final consumption expenditure calculations are based on Susenas results. However, because the estimation of household expenditure data from Susenas tends to be underestimate (especially for non-food groups and processed food groups), adjustment is necessary.

In making adjustments, secondary data is used in the form of data or supply indicators from various data sources outside Susenas. After the adjustment results are obtained, what is done is to replace the Susenas results with the results of calculations based on secondary data. Replacement is done at the level of commodities, commodity groups, or certain types of expenditure. This is done because the results of calculations from secondary data are considered to reflect the actual household final consumption expenditure more.

The calculation step above produces the amount of household final consumption expenditure based on the current price. Household final consumption expenditure on the basis of constant prices 2010, was obtained by deflecting household final consumption expenditure at current prices with the 2010 base year CPI.

For more details, steps for calculating household final consumption expenditure can be summarized as follows:

1. Household final consumption expenditure estimation of Susenas results:
 - a. Food = consumption expenditure per capita a week $\times (30/7) \times 12 \times$ total population mid-year
 - b. Non-food = consumption per month per capita $\times 12 \times$ mid-year population
2. The 1st point data is grouped into 7 COICOP groups, with several commodities that may be controlled separately;
3. The third point data is corrected using secondary data or commodity supply indicators of certain types of expenditure;

4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-adjust;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. PKRT atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Melayani Rumah Tangga (LNPRT)

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

Karakteristik unit LNP adalah sbb :

- a. LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat.
- b. Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga.
- c. Setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga.
- d. Kebijakan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus.

4. Obtained the 2010 PKRT value that has been adjusted;
5. Arrange an Implicit Index based on the City CPI (nearest Province/City);
6. Household final consumption expenditure based on constant 2010 prices is obtained by dividing the results of the 4th point with the results of the 5th point.

2.2 Final Consumption of Non-Profit Institutions Serving Household (NPISH)

The Non-Profit Institution that Serves Household Sector (NPISH) emerges as a separate sector in a regional economy. This sector plays a role in providing goods and services for its members and households for free or at a price level that is not economically meaningful. Economically meaningless prices mean that prices are usually below market prices (not following prevailing market prices).

NPISH is part of a non-profit organization (NPI). In accordance with its function, NPI is distinguished from NPI that serves households and NPIs that serve non-households.

NPI unit characteristics are as follows:

- a. *NPI is generally a formal institution, but sometimes an informal institution whose existence is recognized by the community.*
- b. *Supervision of the organization is carried out by elected members who have the same rights, including the right to speak at the decision of the institution.*
- c. *Each member has certain responsibilities in the organization, and does not have the right to master profits or surpluses, because the profits derived from productive business activities are controlled by the institution.*
- d. *Institutional policy is decided collectively by elected members, and this group functions as the executor of the board.*

- e. istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas tujuh jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non-pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya.
- c. Penyusutan.
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi LNPRT adalah:

- a. Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SKLNP). Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.

- e. *the term nonprofit does not mean that this institution cannot create a surplus through its productive activities, but the surplus obtained is usually reinvested in similar activities.*

NPISH is an institution that serves its members or households, and is not controlled by the government. Members of the institution referred to here are those who are not in the form of a business entity. NPISH is divided into seven types of institutions, namely: Community organizations, social organizations, professional organizations, social/cultural/sports/hobby associations, non-governmental organizations, religious institutions, and humanitarian aid/scholarship organizations.

The final consumption of NPISH value is the same as the non-market output value produced by NPISH. The non-market output value is calculated based on the value of all NPISH expenditures in order to carry out its operational activities. The intended expenditure consists of:

- a. *Consumption between, for example: purchase of stationery, printed materials, payment of electricity, water, telephone, telex, facsimile, costs of meetings, seminars, banquets, transportation, fuel, official travel, shopping for other goods and services, building rent, office equipment rental etc.*
- b. *Labor compensation, for example: wages, salaries, overtime, honoraria, bonuses and other benefits.*
- c. *Depreciation.*
- d. *Other taxes on production (minus subsidies), for example: UN, STNK, BBN etc.*

Data sources used to estimate LNPRT are:

- a. *Results of Special Non-profit Institution Survey (SKLNP). The information obtained from the results of SKLNP is the average expenditure by type of institution and type of expenditure.*

b. Hasil *updating* direktori LNPRT. Informasi yang diperoleh dari hasil *updating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.

c. Indeks Harga Konsumen (IHK)
PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Estimasi PK-LNPRT dengan menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenis-nya dihitung dengan rumus sbb :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : Jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sbb:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

b. The results of updating the NPISH directory. The information obtained from the results of updating the NPISH directory is the number of NPISH population by type of institution.

c. Consumer Price Index (CPI)

Final consumption of NPISH is estimated using the direct method, which uses the SKLNP results. Final consumption of NPISH estimation by calculating the average expenditure by type of institution and type of expenditure (goods and services). Goods and services obtained for free, the value is estimated to be in accordance with the prevailing market prices. The average agency expenditure by type is calculated by the following formula:

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Average expenditure by type of institution and type of expenditure

x_{ij} : Final consumption of NPISH survey results by type of institution and type of expenditure

n_i : The number of samples of NPISH by type of institution

i : Type of NPISH institution, $= 1, 2, 3, \dots, 7$

j : Expenditure type NPISH, $= 1, 2, 3, \dots, 19$

Estimating Final consumption of NPISH, using the following

formula:
$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : Final consumption of NPISH is valid

N_i : NPISH population by type of institution

The results of the calculation above will be obtained by the amount of final consumption of NPISH based on the current price. Final consumption of NPISH on the basis of constant prices 2010, was obtained by defining final consumption of NPISH with the 2010 base year CPI.

2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

2.3 Government Final Consumption Expenditures

The government unit is an institutional unit that is formed through the political process, and has power in the fields of legislative, judicial and executive institutions of other institutional units within the boundaries of a country/region. The government also has various roles and other functions, such as providing goods and services to groups or individuals of households, as collectors and tax managers or other income, functioning to distribute income or welfare through transfer activities, and to engage in non-market production.

In an economy, government units can act as consumers and producers, as well as regulators who determine various policies in the fiscal and monetary fields. As consumers, the government will carry out consumption activities on final goods and services. Whereas as a producer, the government will conduct activities to produce goods & services and investment activities.

The magnitude of the value of government final consumption expenditure is the same as the production value of goods and services produced by the government for consumption by the government itself. PK-P includes the purchase of routine goods and services, payment of employee wages and salaries, social transfers in the form of goods, estimated depreciation of capital goods, and the value of output from Bank Indonesia, less the value of sales of goods and services produced by production units that cannot separated from government activities.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sbb:

- a. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
- b. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

The activities of government production units that cannot be separated from general government activities include the following activities:

- a. *Producing the same or similar goods as goods produced by the company. For example, the activity of printing publications, postcards, reproduction of art, plant nurseries in the experimental garden, etc. The activity of selling such items is incidental to the main functions of the government unit.*
- b. *Producing services. For example, the activities of organizing hospitals, schools, colleges, museums, libraries, recreation places and storing works of art financed by the government. In this case the government charges a fee which is generally no more than all the costs incurred. Revenues received from such activities are referred to as non-commodity revenues (service revenues).*

The government sector consists of the central government and local governments. In carrying out its activities, the central government unit will refer to the State Budget (APBN) document, while the regional government units (both Provincial, District / City, and Village) refer to the Regional Government Revenue and Expenditure Budget.

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup:

- a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi.
- b. PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan.
- c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi.
- d. PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Dirjen Perbendaharaan Aceh)
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Dinas Keuangan Aceh dan Dinas Keuangan Kabupaten/Kota)
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- d. Output Bank Indonesia (BI)
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

Secara umum, PK-P adh Ber laku dihitung menggunakan rumusan berikut:

PK-P adh Ber laku=

Output non pasar-penjualan barang dan jasa + output Bank Indonesia

Output **non-pasar** dihitung dengan pendekatan biaya yg dikeluarkan, yaitu belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Provinsi, PK-P Provinsi atas dasar harga berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Provinsi itu sendiri ditambah pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi tersebut ditambah pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut ditambah pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari Provinsi yang bersangkutan.

Provincial final consumption consumption includes:

- a. *Government Consumption-Regency/City Government located in the province.*
- b. *Government Consumption-Provincial Government concerned.*
- c. *Government Consumption-Central Government which is part of the Provincial government.*
- d. *Government Consumption-Village/Village/Nagari Government in the relevant Province.*

The basic data used to calculate the Annual Provincial Government Final Consumption are:

- a. *Annual APBN realization data (Director General of Aceh Treasury)*
- b. *Data on annual APBD realization (Aceh Finance Office and District / City Finance Office)*
- c. *Regional Finance Statistics (BPS)*
- d. *Bank Indonesia (BI) Output*
- e. *Salary of Civil Servants (PNS) from the Ministry of Finance and the Price Index from BPS.*

In general, Applicable Government Consumption Expenditure is calculated using the following formula:

Government Consumption Expenditure at current prices=

Non-market-sales output of Bank Indonesia goods and services + output

Non-market output is calculated by the approach of costs incurred, namely expenditure on procurement of goods / services, social assistance in the form of goods (purchased at market prices), personnel expenditure, and depreciation.

For the Provincial, Provincial Government Consumption Expenditure levels at current prices, it is calculated based on the sum of the Provincial government's final consumption expenditure plus the final government consumption expenditure of all Regency / City governments in the Province plus the final expenditure of all village / kelurahan / nagari governments those in the province are added to the Central government expenditure which is part of the province concerned.

Pengeluaran konsumsi pemerintah atas harga konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidayakan. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Government consumption expenditure at fixed prices calculated using the deflation method. The deflator used was the general export price index (IHPB) without exports, the Wage Index, the Implicit Index of the Gross Domestic Product component of Gross Fixed Capital Formation, the General Consumer Price Index (CPI).

2.4 Gross Fixed Capital Formation (GFCF)

Investment activity is one of the main factors that will affect the economic development of a country / region. The investment here consists of physical investment and financial investment. In the context of GRDP, physical investment activity is reflected in the component of Gross Fixed Capital Formation (GFCF) and Inventory Change.

GFCF is closely related to the existence of fixed assets that are involved in the production process. Broadly speaking, fixed assets can be classified according to types of capital goods such as: buildings and other construction, machinery and equipment, vehicles, plants, livestock, and other capital goods.

GFCF is defined as the addition and reduction of fixed assets in a production unit, within a certain period of time. The addition of capital goods includes the procurement, manufacture, purchase, financial leasing of new domestic capital goods and new and used capital goods from abroad (including major repairs, transfers or barter of capital goods), and the growth of cultivated biological resources. . Whereas the reduction of capital goods includes sales, transfers or barter, and leasing (financial leasing) of used capital goods on other parties. Exclusion of losses caused by natural disasters is not recorded as a reduction.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

PMTB terdiri dari :

- a. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya.
- b. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan.
- c. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PMTB adalah:

- a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Prov./Kab. /Kota.
- b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level Provinsi).
- d. Laporan keuangan perusahaan.
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level Provinsi.

Capital goods have a service life of more than one year, and will experience shrinkage over their lifetime. The term "gross" indicates that it still contains elements of depreciation. Depreciation or consumption of capital goods represents a decrease in the value of capital goods used in the production process normally during a period.

GFCF consists of:

- a. *Addition minus reduction in assets (assets) of both new and used goods, such as residential buildings, non-residential buildings, other buildings, machinery & equipment, transportation equipment, cultivated assets, plant intellectual property (intellectual property products), and so on.*
- b. *The cost of transferring ownership of non-financial assets that are not produced, such as land and patented assets.*
- c. *Major asset improvements, aimed at increasing production capacity and useful life (such as overhaul of production machinery, coastal reclamation, opening, drying and irrigation of forests, as well as prevention of floods and erosion).*

Data sources used to estimate GFCF are:

- a. *The output of the construction industry is the result of GRDP calculation according to the construction industry from the BPS Prov. /City.*
- b. *Imported 2-digit HS value, which is an imported capital goods from the local KPPBC (Office of Supervision and Customs Service).*
- c. *Medium Industrial Production Index from Small & Household Industry Statistics (Provincial level).*
- d. *Company financial statements.*
- e. *Publication of Provincial and Large-Scale Industry Statistics.*

- f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.
- i. Publikasi Statistik Konstruksi.
- j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan "langsung" adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan "tidak langsung" adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan "arus komoditas". Dalam hal ini penyediaan atau "supply" dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

- f. IHPB from Statistics on Wholesale Trading Prices.
- g. Mining and Excavation Statistics Publications (oil and gas and non-oil and gas).
- h. Statistics on Electricity, Gas & Water Supply.
- i. Publication of Construction Statistics.
- j. Mineral Exploration Data from the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM).
- k. Animal Husbandry Statistics, Directorate General of Animal Husbandry.

Calculation of GFCF can be done through direct or indirect methods, depending on the availability of data that may be obtained in their respective regions. The "direct" approach is by calculating the formation of capital (fixed assets) carried out by various economic sectors (producers) directly. Whereas the "indirect" approach is to calculate based on the allocation of the total supply of products (goods and services) that become capital goods in various industries, or referred to as the "commodity flow" approach. In this case the supply or "supply" of capital goods can come from domestic (domestic) production or from foreign products (imports).

GFCF calculation directly done by adding up all the value GFCF is happening in every industry (activities). Capital goods are valued on the basis of price (adh) purchase, includes all costs incurred, such as transportation costs, installation costs, taxes, and other costs associated with the procurement of capital goods. For capital goods that are imported in it, including customs duties and taxes associated with the procurement or transfer ownership of such capital goods.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di "deflate" (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasikan menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik adh Berlaku maupun adh Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasikan output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB adh Berlaku. Untuk memperoleh nilai adh Konstan adalah dengan men-deflate PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan kedua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara "ekstrapolasi" atau mengalikan PMTB adh Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu.

Basically the data for calculating GFCF directly can be obtained from the company's financial statements. The data provided include information/data on changes in fixed assets (GFCF) were assessed adh force or the purchase price (acquisition). To obtain the value of GFCF adh Constant, the GFCF of the at constant market prices in the "deflate" (divided) by the wholesale price index (WPI) in accordance with the capital goods.

Calculation of GFCF in an indirect way, referred to as the commodity flow approach (commodity flow approach). This approach is done by calculating the value of the supply of goods produced by various industries (supply), which later became part of which was allocated for capital goods. Calculation of GFCF in the form of the building, carried out using a specific ratio of the value of output of the construction industry, both at current market prices or at constant market prices.

Calculation of GFCF in the form of machinery, transport equipment and other capital goods are distinguished on capital goods originating from domestic production and from imports. For domestic capital goods, can be obtained in two ways. First, by allocating output of machinery, transport equipment and other capital goods into capital formation. This value is still to be added to the cost of transport and trading margin, in order to obtain GFCF adh Applicable. To obtain the value adh Constant is setting deflate GFCF (at current market prices) with WPI in accordance with the type of capital goods.

The second approach, which should be done when the data output is not available is by way of "extrapolation" or GFCF at basis price multiplying the production index corresponding types of capital goods. For the calculation of GFCF begins with calculating the constant price first.

Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut di "reflate" (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap. Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkut dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkut dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Ke dua*, untuk memperoleh PMTB adh konstan adalah dengan cara men"deflate" PMTB adh berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunan-nya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk adh Konstan diperoleh dengan mendeflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Furthermore, to obtain GFCF at current price, the GFCF value is constant in "reflate" (multiplied) by the price index of each type of capital goods that are appropriate (as an inflator). This requires that GFCF at constant price in the previous years be fully available. Calculation of GFCF in the form of machinery, transportation equipment and other capital goods originating from imports, is carried out using 2 (two) methods.

First, GFCF is valid obtained from the total value of imported goods. Furthermore, the capital goods are detailed according to the main groups such as machinery, transportation equipment and other capital goods. If the details are not available, certain ratios can be used as allocators (2-digit HS code imported capital goods). Secondly, to obtain GFCF is Constant is to "deflate" GFCF and apply by using the appropriate price index.

GFCF at current price for intangible capital goods such as mineral exploration, calculated by collecting data on financial statements of public companies in the mining industry. By using panel data, the growth is valid. The validity of mining activities is a multiplier in the value of mineral exploration in the previous period. Whereas GFCF is constant, it is obtained by deflating the value of the Adj. Applicable to the implicit index of the GRDP of the mining industry. In addition, data from ESDM and BP Migas are expected to be the basis or control data for annual data.

For software, GFCF is valid by collecting data on open company financial statements in the software field. For ADH Constant is obtained by deflate the value is valid with the implicit index of the company service industry.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original, data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstannya diperoleh dengan cara mendeflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tidak langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 Perubahan Inventori

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, disamping tenaga kerja dan barang modal. Dalam PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

GFCF calculation of entertainment, literature and original art works, data collected is the value of soap operas and television programs that can be made. Whereas film import data is obtained from film import values. The GFCF is constant, obtained by defining the value of the adh applicable with the implicit index of the entertainment service industry and IHPB of imported goods.

There are several problems that occur in calculating GFCF through an indirect approach (commodity flow), namely:

- a. The ratio of the use of industrial output to capital goods tends to be static. To improve a large scale survey is needed.*
- b. Trade and transport margin values are difficult to obtain.*
- c. Lag time between the year of measurement data (reference) and publication data obtained from certain data sources, too long.*

2.5 Change in Inventory

In economic activities, inventory functions as one of the components needed for the sustainability of the production process, in addition to labor and capital goods. In GRDP, the Inventory Change component is part of Gross Capital Formation, or better known as physical investment that occurs in a certain period of time in a region. Inventory changes represent part of investments realized in the form of finished goods, semi-finished goods, and raw materials and auxiliary materials for a certain period. The availability of inventory change data is important to meet the analysis needs of investment activities.

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

A simple understanding of inventory (inventory) is goods that are controlled by the producer for the purpose of being processed further (intermediate consumption) into goods in other forms, which have economic value and a higher value of benefits. Included in this definition are goods that are still in the process of work (progress in progress), as well as finished goods that have not been marketed and are still controlled by the producer.

Inventory changes are the difference between the inventory value at the end of the accounting period and the inventory value at the beginning of the accounting period. Inventory changes explain changes in inventory position, which can mean an increase (positive sign) or a reduction (negative sign).

For producers, the existence of inventories is needed to maintain the continuity of the production process, so that it is necessary to reserve both in the form of raw materials or auxiliary materials. Uncertainty caused by external influences is also a factor of consideration for employers to make reserves (especially raw materials). For traders, procurement of inventory is more influenced by speculative elements in the hope of obtaining greater profits. As for the government, reserve policies, especially strategic commodities, are primarily aimed at maintaining economic, political and social stability. Because it concerns the interests of the wider public (public), there needs to be a reserve for several staple commodities such as rice, flour, cooking oil and sugar. For households, the procurement of inventory is aimed more at the ease of managing their consumption behavior.

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi.
- b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi.
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli.
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual. Ternak untuk tujuan dipotong.
- f. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan.
- g. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- a. Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- b. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD.
- c. Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian.
- d. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- e. Data komoditas perkebunan.
- f. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih.
- g. Indeks harga perdagangan besar (IHPB).

Inventories can be classified according to the type of goods as follows:

- a. *Inventories by industry, such as products or crops, forestry, fisheries, mining, processing industries, city gas, clean water, and construction.*
- b. *Various types of raw & auxiliary materials (materials & supplies), namely all materials, components or supplies for further processing into finished goods.*
- c. *Finished goods, which are goods that have been processed but have not been sold or have not been used, including goods sold in the same form as when they were purchased.*
- d. *Semi-finished goods, namely goods that have been partially processed or not finished (not including unfinished construction).*
- e. *Merchandise that is still controlled by wholesalers and retailers for sale purposes. Livestock for the purpose of cutting.*
- f. *Procurement of goods by the merchant for the purpose of being sold or used as fuel or supplies.*
- g. *Inventory to the government, which includes strategic items such as rice, soybeans, sugar, and wheat.*

Data sources used for calculating inventory change components are:

- a. *Financial reports of related companies from surveys or downloading the Indonesia Stock Exchange website (www.idx.co.id);*
- b. *Financial Statements of BUMN / BUMD Companies.*
- c. *Mining commodity data from mining and quarry statistics publication.*
- d. *Annual Publication Inventory Data for Large Medium Industries.*
- e. *Plantation commodity data.*
- f. *The selected industrial GDP implicit price index.*
- g. *Large trade price index (IHPB).*

- h. Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

Terdapat dua metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi "korporasi", sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi "komoditas".

Di lihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adh berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan adalah sbb:

- a. Menghitung posisi inventori adh Konstan, dengan cara *mendeflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun.
- b. Menghitung perubahan inventori adh Konstan dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya.
- c. Menghitung perubahan inventori adh Berlaku dengan *menginflate* perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

- h. *Other external data, such as rice preparation data from the Bureau of Logistics, cement data from the Indonesian Cement Association (ASI), sugar from the Indonesian Sugar Board (DGI), and livestock from the Ministry of Agriculture's Ditjennak.*

The method used in the inventory process is direct approach and indirect approach. The direct approach is an approach from the "corporate" side, while the indirect approach is from the "commodity" side.

In terms of its benefits, it directly produces relatively better data with indirect results. The approach can only be done if the inventory position data is available in detail and continuously.

By using a direct approach, an inventory value will be obtained at a certain time (usually at the end of the year). The main data source is the company's year-end report (balance sheet). For inventory requirements, there is an inventory data in consecutive years. The inventory calculation steps from the financial statements are as follows:

- a. *Calculate inventory and constant positions, by defining initial and final stock with IHPB at the end of the year.*
- b. *Produce inventory and Constant by reducing the position in the current year with the previous year.*
- c. *Generate more than one way to apply it with Constant annual average IHPB.*

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan:

- a. mendeflate nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai
- b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah:

- a. Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan.
- b. Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya.
- c. Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai.
- d. Diperlukan *adjustment* dengan cara me-*mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia.

2.6 Ekspor Impor

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor.

An indirect approach is also called a commodity flow approach. The main data used is the volume and price of each inventory item. The value of inventory changes is valid by calculating the change in the final stock volume and the initial stock multiplied by the average purchase price, or the selling price if the purchase price data is not available. Constant adh inventory changes are calculated by:

- a. *deflate the value of inventory changes is valid with the appropriate price index*
- b. *multiplying the change in the final stock volume and the initial stock multiplied by the price of the item in the base year.*

The limitations and problems faced in calculating Inventory Change components are:

- a. *Inventory data needed is in the form of positions or at one time for consecutive time periods.*
- b. *Not all inventory commodities have volume and price data available.*
- c. *Inventory change data available in the form of volume is generally not accompanied by price data. If inventory price data is not available, it can be assumed that the inventory commodity price index follows the corresponding GDP implicit index.*
- d. *Adjustments are needed by marking up, in order to complete estimates for industries where data is not available.*

2.6 Import Export

Export-import activity in a region is believed to have occurred for a long time, even before the region was designated as a government area. The variety of goods and services produced and price disparity are the main factors in the emergence of export-import activities.

Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

Ekspor-Import pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut.
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut. Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
- c. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$).
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$).
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI.
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan.

Regions that cannot meet their own needs try to bring in from other regions or even countries. On the other hand, regions that produce goods and services exceed domestic needs, are encouraged to expand markets outside the region or even abroad.

Along with the times, production activities and public demand for goods and services are increasing and diverse. Progress in the field of transportation and communication also helped smooth the flow of goods and services distribution. These conditions further encourage export-import activities in a region to become more developed.

Export-import in a region is defined as the transfer of ownership of the economy (whether sales / purchases, barter, gifts or grants) of goods and services between residents of the region and non-residents outside the area.

Export-Import in an area consists of:

- a. *Export / import of goods from / to foreign countries to / from the province.*
- b. *Export / import services from / to foreign countries to / from the province. Coverage of services includes transportation, insurance, communication, tourism and other services*
- c. *Net exports between regions*
 - *Exports between regions*
 - *Imports between regions*

The data sources used to estimate PKRT are:

- a. *Statistics of Goods Export Notification (PEB) from BPS (in US \$).*
- b. *Statistics of Goods Import Notification Statistics (PIB) from BPS (in US \$).*
- c. *Indonesia's Balance of Payments from BI.*
- d. *Simopel Report, which is a report (monthly) loading and unloading of goods at the port.*

- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang.
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia.

Ekspor-Import barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Import barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-import jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-import tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

- e. *Information on the traffic of goods in and out of the province at weigh stations.*
- f. *Traffic information of goods in and out of the province from the survey results.*
- g. *Weighted average transaction rates from Bank Indonesia.*

Export-Import of foreign goods is assessed according to the price of free on board (FOB) in US \$. Calculation of foreign goods exports is carried out by multiplying the value of the goods (according to PEB) with the buying transaction rate of the weighted average. While foreign goods imports are carried out by multiplying the value of goods (according to PIB) with the weighted average selling transaction rate. The value of export-import services comes from Indonesia's Balance of Payments (BOP) issued by Bank Indonesia. Besides that, the export-import value is still added / reduced by the value of direct purchase and undocumented transactions by both residents and non-residents. While net exports between regions are the residual value (residual) between the GRDP of the business field and the expenditure GRDP.

III. TINJAUAN PEREKONOMIAN BERDASARKAN PDRB MENURUT PENGELUARAN

III. ECONOMIC REVIEW BASED ON GRDP BY EXPENDITURE

3.1 Tinjauan Agregat PDRB Menurut Pengeluaran

3.1 Aggregate Review of GRDP by Expenditure

3.1.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010

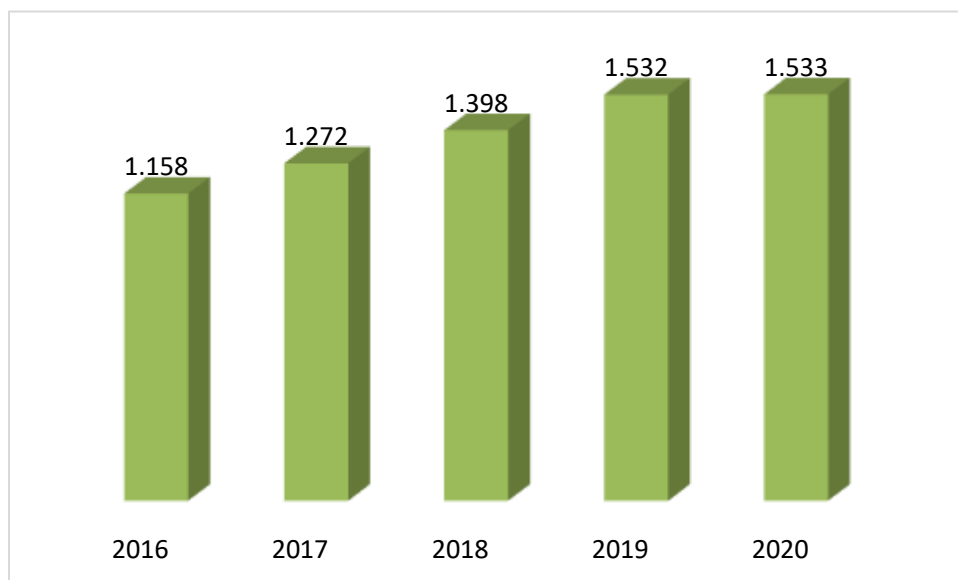
3.1.1 GRDP at Current Prices and on the basis of Constant 2010 Prices

Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menurut pengeluaran selama tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, nilai PDRB sebesar 1,16 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2017 naik menjadi 1,27 triliun rupiah, lalu meningkat lagi pada tahun 2018 berikutnya menjadi 1,397 triliun rupiah. Pada tahun 2019, tercatat PDRB ADHB menurut pengeluaran sebesar 1,531 triliun rupiah dan meningkat menjadi 1,533 triliun rupiah pada tahun 2020.

The development of GRDP value based on current prices (ADHB) according to expenditure during 2016-2020 has increased from year to year. In 2016, the GRDP amounted to 1.16 trillion rupiah. Then in 2017 it rose to IDR 1,27 trillion, then increased again in the following year to IDR 1,397 trillion. In 2019, the ADHB GRDP was recorded according to expenditure of IDR 1,531 trillion and increased to IDR 1,533 trillion in 2020.

Gambar 3. 1 Produk Domestik Regional Bruto ADHB Menurut Pengeluaran (Triliun Rupiah), 2016-2020

Figure 3. 1 Gross Regional Domestic Product by Expenditure at Current Prices (Trillion Rupiah), 2016-2020



* Angka sementara/Preliminary Figure

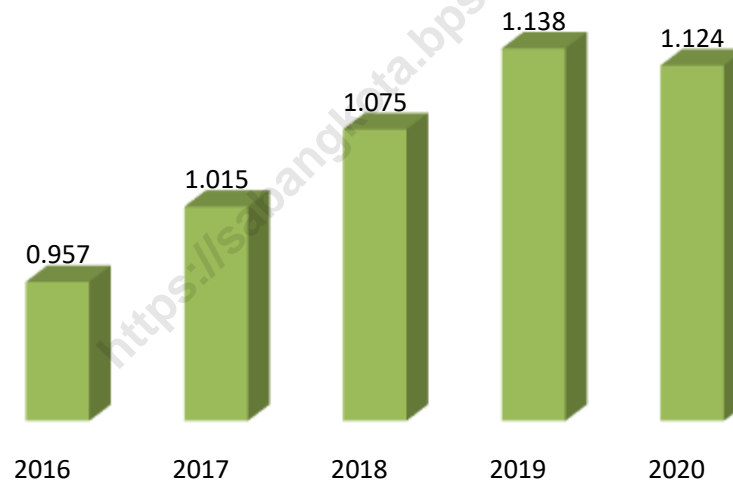
** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure

Seiring dengan peningkatan nilai PDRB ADHB, nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) Kota Sabang juga menunjukkan tren peningkatan selama periode 2016-2020. Nilai PDRB ADHK 2010 tercatat sebesar 0,96 triliun rupiah pada tahun 2016. Pada tahun 2017, tercatat nilai PDRB ADHK Kota Sabang meningkat menjadi sebesar 1,015 triliun rupiah. Pada tahun berikutnya meningkat lagi menjadi 1,075 triliun rupiah dan pada tahun 2019 meningkat lagi menjadi 1,14 triliun rupiah. Selanjutnya terjadi peningkatan kembali pada tahun 2020 menjadi 1,124 triliun rupiah.

Along with the increase in the value of the ADHB GRDP, the GRDP value based on constant prices (ADHK) of Sabang City also showed an increasing trend during the 2016-2020 period. The 2010 ADHK GRDP value was recorded at IDR 0,96 trillion rupiah in 2016. In 2017, Sabang's Regency ADHK GRDP recorded an increase of IDR 1,015 trillion rupiah. In the following year it increased again to IDR 1,075 trillion rupiah and in 2019 it increased again to IDR 1.14 trillion rupiah. Furthermore, there was an increase again in 2020 to IDR 1.124 trillion rupiah.

Gambar 3. 2 Produk Domestik Regional Bruto ADHK 2010 Menurut Pengeluaran (Triliun Rupiah), 2016-2020

Figure 3. 2 Gross Regional Domestic Product at 2010 Constant Prices by Expenditure (Trillion Rupiah), 2016-2020



* Angka sementara/Preliminary Figure

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure

3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi, akan lebih efektif jika menggunakan pertumbuhan PDRB ADHK. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, laju pertumbuhan ekonomi ADHK tidak dipengaruhi oleh unsur harga. Harga pada ADHK bersifat tetap dan harga yang digunakan pada publikasi ini adalah tahun 2010 sebagai tahun dasar yang terbaru.

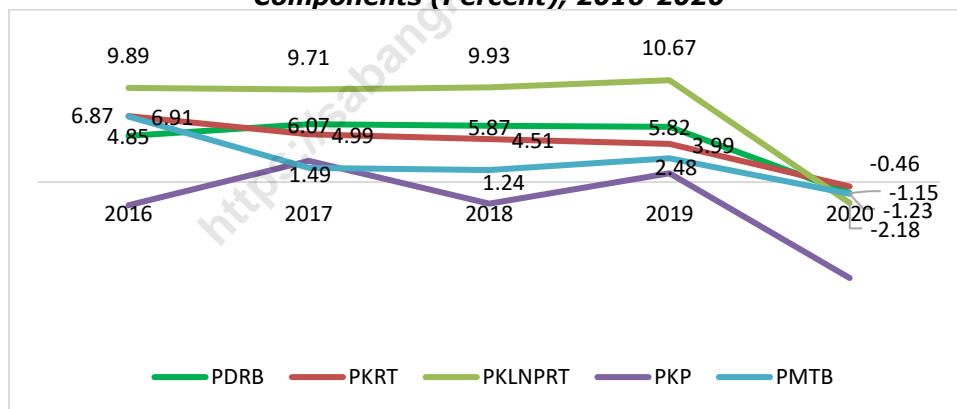
3.1.2 Economic Growth

To see the pace of economic growth, it will be more effective to use ADHK GRDP growth. As previously explained, the economic growth rate of ADHK is not influenced by the price element. Prices on ADHK are fixed and the prices used in this publication are 2010 as the latest base year.

Secara umum laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010 pada periode 2016-2020 mengalami penurunan dengan nilai yang negative pada akhir periode. Pertumbuhan ekonomi Kota Sabang pada tahun 2016 sebesar 4,85 persen dan sedikit meningkat menjadi 6,07 persen di tahun 2017 dan tercatat sebagai pertumbuhan ekonomi tertinggi pada periode ini. Pada tahun berikutnya, terjadi perlambatan laju pertumbuhan menjadi 5,87 persen. Kemudian pada tahun 2018 mengalami sedikit perlambatan menjadi sebesar 5,86 persen, dan perlambatan terjadi lagi pada tahun 2019 menjadi sebesar 5,82 persen. Penurunan terus terjadi hingga pada tahun 2020 menjadi -1,15 persen. Kontraksi angka pertumbuhan tersebut disebabkan karena adanya pandemi COVID-19.

In general, the 2010 ADHK GRDP growth rate in the 2016-2020 period decreased with a negative value at the end of the period. The economic growth of Sabang City in 2016 was 4.85 percent and slightly increased to 6.07 percent in 2017 and was recorded as the highest economic growth in the last five years. In the following year, the growth rate slowed down to 5.87 percent. Then in 2018 it experienced a slight slowdown to 5.86 percent, and the slowdown occurred again in 2019 to 5.82 percent. The decline continues until 2020 to become -1.15 percent. The contraction in the growth rate in 2020 is due to the COVID-19 pandemic.

Gambar 3. 3 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Komponen Pengeluaran (Persen), 2016-2020
Figure 3. 3 Growth Rate of 2010 ADHK GRDP According to Expenditure Components (Percent), 2016-2020



* Angka sementara/Preliminary Figure

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure

Jika dilihat berdasarkan rincian komponen pengeluaran, pada tahun 2020 komponen yang paling tinggi pertumbuhannya adalah komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKP) dengan pertumbuhan mencapai -0,46 persen. Hal ini disebabkan oleh banyaknya banyaknya bantuan yang diterima rumah tangga selama pandemi sehingga daya beli masyarakat cukup terjaga walaupun tetap mengalami penurunan.

When viewed based on the details of the expenditure components, in 2020 the component with the highest growth was the Household Consumption Expenditure (PKP) component with growth reaching negative 0.46 percent. This is due to the large amount of assistance received by households during the pandemic so that people's purchasing power is sufficiently maintained although it continues to decline.

Disusul di tempat kedua dan ketiga oleh komponen komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPRT) dengan pertumbuhan sebesar -1,23 dan -2,18 persen. Angka pertumbuhan PMTB yang berkontraksi tersebut selain dikarenakan adanya pandemi yang membuat proyek-proyek konstruksi terhambat juga selesainya pembangunan Pelabuhan Balohan pada tahun 2020.

Komponen yang mengalami pertumbuhan dengan negatif cukup dalam yaitu Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) sebesar -10,05 persen. Hal tersebut dikarenakan selama masa pandemi pengeluaran konsumsi pemerintah banyak dihemat dan dialihkan ke penanganan pandemi COVID-19. Penghematan yang dilakukan salah satunya adalah dari akun belanja pegawai, tidak adanya pemberian gaji ketiga belas dan empat belas seperti tahun-tahun sebelumnya.

3.1.3 Distribusi Persentase PDRB Menurut Pengeluaran

Sebagaimana struktur ekonomi di sebagian besar wilayah, struktur perekonomian Kota Sabang di dominasi oleh PMTB dan Konsumsi Pemerintah. Pada tahun 2020, PMTB Sabang sebesar 68,96 persen, mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 83,19 persen. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada tahun 2016 sebesar 84,48 persen mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 60,87 persen. Ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di Kota Sabang dalam kurun waktu lima tahun cukup bergantung pada PMTB dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.

Followed in second and third place by components of the components of Gross Fixed Capital Formation (PMTB) and Consumption Expenditures for Non-Profit Institutions Serving Households (PKLNPRT) with growth of -1.23 and -2.18 percent. The contraction of the PMTB growth rate was not only due to the pandemic which hampered construction projects as well as the completion of the Balohan Port construction in 2020.

The component that experienced deep negative growth was Government Consumption Expenditure (PKP) of -10.05 percent. This is because during the pandemic, government consumption was saved and diverted to handling the COVID-19 pandemic. One of the savings made was from the employee expenditure account, the absence of the thirteenth and fourteen salary payments as in the previous years.

3.1.3 Percent Distribution of GRDP by Expenditure

As the economic structure in most regions, the economic structure of Sabang City is dominated by the GFCF and Government Consumption. In 2020, Sabang GFCF was 68.96 percent, a decrease from 2016 by 83.19 percent. Government Consumption Expenditures in 2016 amounted to 84.48 percent, decreased in 2020 to 60.87 percent. This shows that economic activities in Sabang City within a period of five years are sufficiently dependent on GFCF and Government Consumption Expenditures.

Pengeluaran Konsumsi rumah Tangga menduduki posisi ketiga dengan sumbangan sebesar 53,99 persen pada tahun 2020. Sedangkan untuk komponen Konsumsi Lembaga Non-Profit Melayani Rumah Tangga hanya menyumbang peranan sebesar 6,12 persen terhadap perekonomian Kota Sabang.

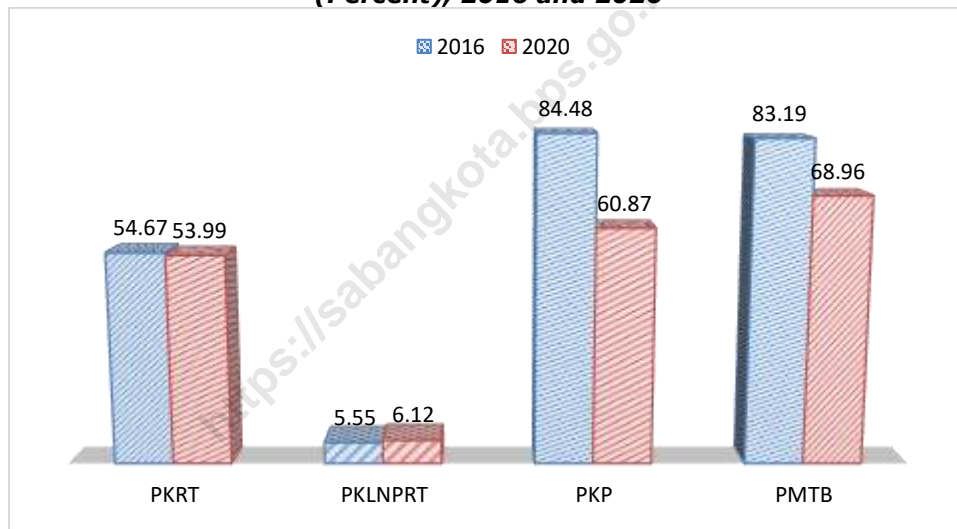
Dari keempat komponen pengeluaran hanya komponen Konsumsi Lembaga Non-Profit Melayani Rumah Tangga yang kontribusinya meningkat pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2016, sementara komponen lainnya mengalami penurunan.

Government Consumption Expenditures occupied the third position with a contribution of 53.99 percent in 2020. As for the Consumption component of Non-Profit Institutions Serving Households only contributed 6.06 percent to the economy of Sabang City.

From the four components of expenditure only the components of Expenditures of Final Consumption of Non-Profit Institutions Serving Household (NPISH) whose contribution increased in 2020 when compared to 2016, while other components experienced a decrease.

Gambar 3. 4 Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (Persen), 2016 dan 2020

Figure 3. 4 Percentage Distribution of GRDP at Current Prices by Expenditures (Percent), 2016 and 2020



* Angka sementara/Preliminary Figure

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure

3.1.4 Indeks Harga Implisit dan Laju Indeks Harga Implisit

Indeks implisit merupakan rasio perbandingan antara PDRB ADHB dengan PDRB ADHK 2010. Karena digunakan sebagai tahun dasar baru, indeks implisit PDRB tahun 2010 sudah pasti bernilai 100. Ini menunjukkan bahwa nilai PDRB ADHB sama dengan nilai PDRB ADHK di tahun 2010. Indeks implisit ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun searah dengan kenaikan harga. Dengan menggunakan tahun dasar 2010, indeks implisit PDRB di tahun 2016 naik menjadi 121,01.

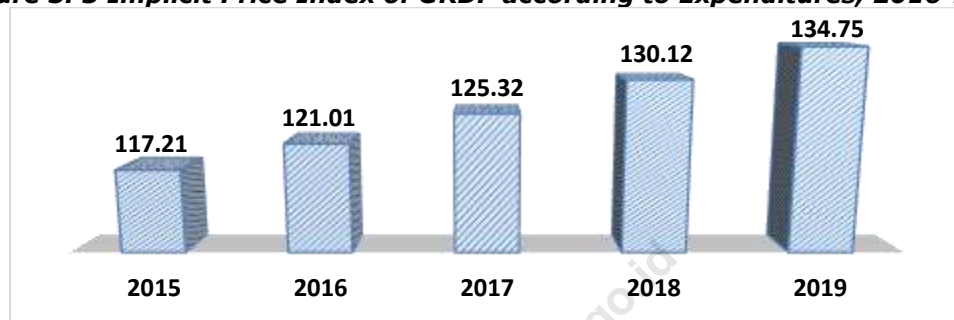
3.1.4 Implicit Price Index and Implicit Price Index Rate

The implicit index is the comparison ratio between GRDP at current prices and GRDP at 2010 constant prices. Because it is used as a new base year, the GRDP implicit index in 2010 is definitely worth 100. This shows that the GRDP at current prices value is the same as the GRDP at constant prices value in 2010. This implicit index will continue increasing from year to year in line with rising prices. By using the 2010 base year, the GRDP implicit index in 2016 rose to 121.01.

Kemudian, naik menjadi 125,32 pada tahun 2017. Indeks ini kembali meningkat di tahun 2018 yaitu menjadi sebesar 130,02 dan terus meningkat hingga sebesar 134,64 di tahun 2019 dan sebesar 136,37 pada tahun 2020. Angka ini menunjukkan bahwa perbandingan harga tahun 2020 dengan harga tahun dasar (2010) mencapai 1,3 kali.

Then, it rose to 125.32 in 2017. This index increased again in 2018 to 130.02 and continued to increase to 134.64 in 2019 and 136.37 in 2020. This figure shows that the price comparison in 2020 with base year prices (2010) reaching 1.3 times.

Gambar 3. 5 Indeks Harga Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, 2016-2020
Figure 3. 5 Implicit Price Index of GRDP according to Expenditures, 2016-2020

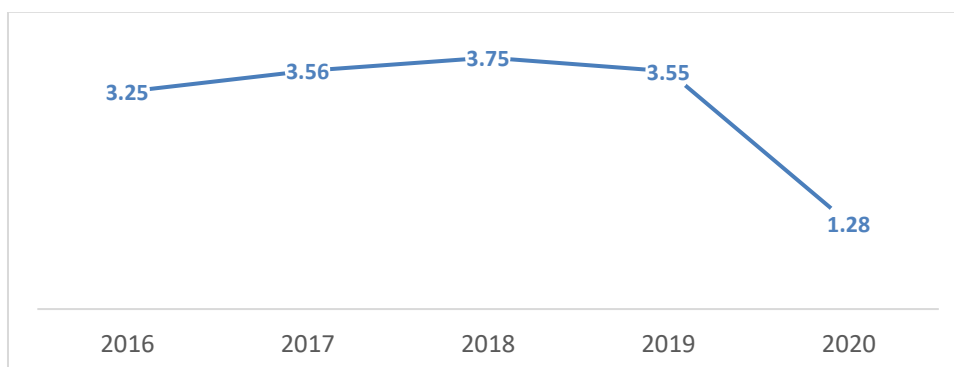


* Angka sementara/Preliminary Figure
 ** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure

Laju indeks implisit PDRB dari tahun 2016-2020 mengalami pergerakan yang berfluktuatif. Laju indeks implisit pada tahun 2016 sebesar 3,25 persen, kemudian meningkat menjadi 3,56 persen pada tahun 2017. Dan kemudian meningkat lagi menjadi 3,75 persen di tahun 2018. Pada tahun 2019, laju pertumbuhan indeks implisit mengalami peningkatan menjadi 3,55 persen dan melambat pada tahun 2020 menjadi 1,28 persen.

The implicit index of GRDP from 2016-2020 experienced a fluctuating movement. The implicit index rate in 2016 was 3.25 percent, then decreased to 3.56 percent in 2017. And then slowed down again to 3.75 percent in 2018. In 2019, the rate of growth of the implicit index increased to 3.55 percent and slowed down in 2020 to 1.28 percent.

Gambar 3. 6 Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Menurut Pengeluaran (Persen), 2016-2020
Figure 3. 6 Growth Rate of Implicit Price Index of GRDP according to Expenditures (Percent), 2016-2020



* Angka sementara/Preliminary Figure
 ** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure

3.2 Konsumsi Rumah Tangga

3.2.1 Distribusi Persentase ADHB

Selama kurun waktu lima tahun dari 2016-2020 kontribusi konsumsi rumah tangga cenderung berfluktuatif, dari 52,94 persen pada tahun 2015 hingga mencapai 52,92 persen di tahun 2019. Tahun 2017 merupakan titik balik bagi distribusi komponen Konsumsi Rumah Tangga ini, karena pada tahun 2017 distribusinya menunjukkan nilai yang paing tinggi selama kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu sebesar 54,71 persen.

3.2 Household Consumption

3.2.1 Percentage Distribution at Current Prices

During the five-year period from 2015-2019 the contribution of household consumption tends to fluctuate, from 52.94 percent in 2015 to 52.92 percent in 2019. 2017 is a turning point for the distribution of components of this Household Consumption, because in 2017 distribution shows a high competitive value over the last five years, amounting to 54.71 percent.

Gambar 3. 7 Distribusi Persentase Komponen Konsumsi Rumah Tangga ADHB (Persen), 2015-2019
Figure 3. 7 Percentage Distribution of Household Consumption Components At Current Prices (Percent), 2015-2019



* Angka sementara/Preliminary Figure

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure

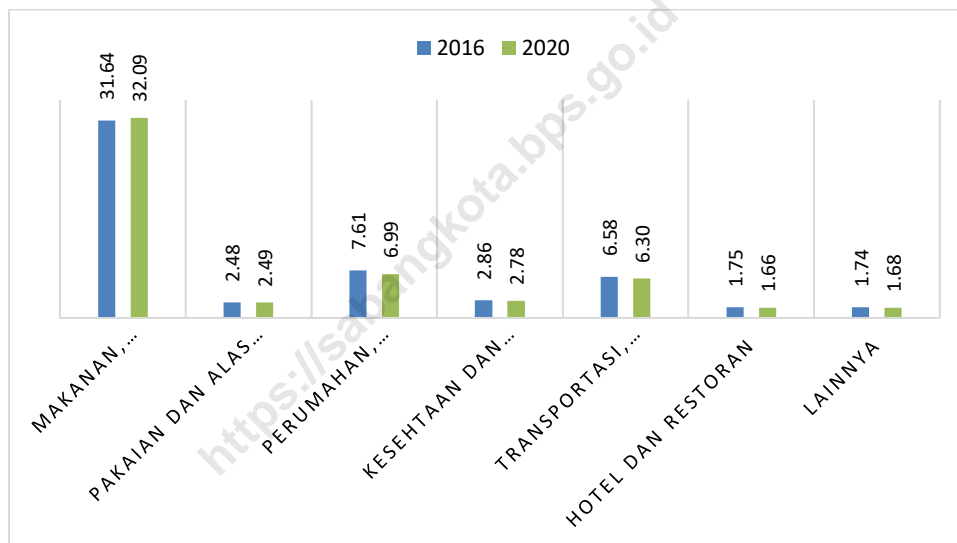
Dari jumlah 52,92 persen konsumsi rumah tangga pada tahun 2019, sebanyak 31,14 persennya digunakan untuk pembelian kebutuhan makanan, minuman, dan rokok. Sedangkan untuk kesehatan dan pendidikan hanya sebesar 2,66 persen, angka ini tidak mengalami banyak perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu 2,77 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Sabang belum banyak menggunakan konsumsi rumah tangganya untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia dan masih terfokus pada pemenuhan kebutuhan makanan.

From the total 52.92 percent of household consumption in 2019, 31.14 percent was used to purchase food, beverages, and cigarettes. As for health, only 2.66 percent, this figure did not experience much change when compared to 2015, which was 2.77 percent. This condition shows that the Sabang community has not used much of their household consumption to improve the quality of human resources and is still focused on meeting food needs.

Kontribusi subkomponen kedua terbesar terhadap komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga yaitu sebesar 6,87 persen pada tahun 2019, sedikit menurun dari tahun 2015 yang sebesar 7,45 persen. Sementara subkomponen yang berkontribusi paling kecil adalah pengeluaran konsumsi untuk lainnya yaitu sebesar 1,69 persen pada tahun 2015 dan sedikit menurun menjadi 1,66 persen pada tahun 2019.

The contribution of the second largest subcomponent to the components of household consumption expenditure was Housing, Tools, Equipment and Housekeeping, which amounted to 6.87 percent in 2019, a slight decrease from 2015 which was 7.45 percent. While the subcomponents that contributed the least were consumption expenditure for others which amounted to 1.69 percent in 2015 and slightly decreased to 1.66 percent in 2019.

Gambar 3. 8 Distribusi Persentase Subkomponen Konsumsi Rumah Tangga ADHB (Persen), 2015 dan 2019
Figure 3. 8 Percentage Distribution of Household Consumption Components at Current Prices (Percent), 2015 and 2019



* Angka sementara/Preliminary Figure

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure

3.2.2 Laju Pertumbuhan

Laju pertumbuhan Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) Kota Sabang relatif stabil dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3.99 persen pada tahun 2016-2020. Laju Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tahun 2020 tercatat sebesar -0,46 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan di tahun 2016 yang tercatat sebesar 6,91 persen. Penurunan laju pertumbuhan ini di dorong oleh adanya pandemic COVID-19 yang menurunkan daya beli masyarakat.

3.2.2 Growth Rate

Growth rate of Household Final Consumption Expenditures of Sabang City is relatively stable with an average growth of 3.99 percent in 2016-2020. Rate Household consumption growth in 2020 was recorded at -0,46 percent, lower than the growth in 2016 which was recorded at 6,91 percent. The decline in the growth rate was driven by the COVID-19 pandemic which reduced people's purchasing power.

Tabel 3. 1 Laju Pertumbuhan Komponen Konsumsi Rumah Tangga ADHK 2010
Table 3. 1 Growth Rate of the 2010 Constant Prices of Household Consumption Component

Komponen/Component	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	6.91	4.99	4.51	3.99	-0.46
a. Makanan, Minuman & Rokok	8.40	5.25	4.44	3.75	0.06
b. Pakaian & Alas Kaki	6.19	6.60	8.36	6.23	-7.32
c. Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	4.85	3.23	1.96	4.00	0.03
d. Kesehatan & Pendidikan	3.78	3.64	4.26	4.04	2.99
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	4.79	6.07	6.57	4.18	-1.13
f. Hotel & Restoran	4.94	5.74	5.89	3.22	-5.84
g. Lainnya	3.57	3.46	3.91	5.65	-1.79

* Angka sementara/Preliminary Figure

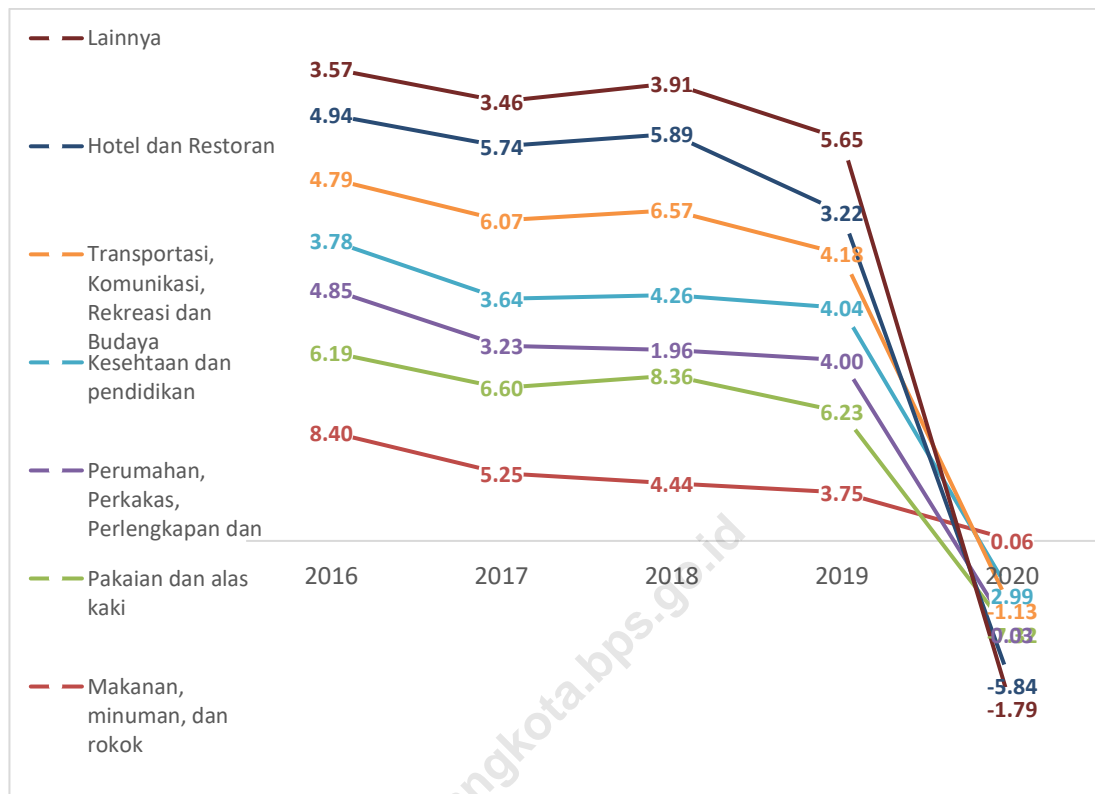
** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure

Bila dilihat berdasarkan subkomponen di tahun 2020, subkomponen Kesehatan dan Pendidikan memiliki pertumbuhan yang paling tinggi bila dibandingkan dengan subkomponen lainnya yaitu dengan pertumbuhan sebesar 2,99 persen. Sementara pertumbuhan terendah dimiliki oleh subkomponen Pakaian dan Alas Kaki dengan pertumbuhan hanya sebesar -7,32 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa selama pandemic atau pada tahun 2020, masyarakat lebih banyak menggunakan dananya pada Kesehatan dan Pendidikan dibandingkan dengan subkomponen lainnya

When viewed based on the subcomponents in 2020, the Health dan Education subcomponent has the highest growth compared to other subcomponents, with growth of 2,99 percent. While the lowest growth is owned by Clothing and Footwear subcomponents with growth of only -7,32 percent. This indicates that during a pandemic or in 2020, the community spent more on Health and Education than other subcomponents.

Gambar 3. 9 Laju Pertumbuhan Komponen Konsumsi Rumah Tangga ADHK 2010 (persen), 2016-2020

Figure 3. 9 Growth Rate of the 2010 Constant Prices of Household Consumption Component (percent), 2016-2020



* Angka sementara/Preliminary Figure

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure

3.2.3 Laju Indeks Implisit

Hal yang erat kaitannya dengan tingkat konsumsi rumah tangga adalah tingkat inflasi. Tingkat inflasi dari konsumsi rumah tangga dan subkomponen pembentuknya masih dikatakan ringan, hal ini terlihat dari laju indeks implisitnya. Secara umum tingkat inflasi konsumsi rumah tangga Kota Sabang masih dibawah 10 persen. Tingkat inflasi tertinggi pada periode 2016-2020 terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 4,71 persen, yang didorong dengan meningkatnya harga-harga pada subkomponen Hotel dan Restoran yaitu sebesar 6,36 persen.

Tingkat inflasi konsumsi rumah tangga pada tahun 2020 adalah sebesar 2,53 persen, ini berarti terjadi kenaikan harga-harga di Kota Sabang untuk konsumsi rumah tangga sebesar 2,53 persen.

3.2.3 Implicit Index Rate

What is closely related to the level of household consumption is the level of inflation or the rate of increase in prices. The inflation rate of household consumption and its constituent subcomponents is illustrated by the rate of the implicit index. In general, the inflation rate of Sabang City household consumption is still said to be mild, this can be seen from the rate of the implicit index which is still below 10 percent. The highest inflation rate in the 2015-2019 period occurred in 2017 at 4.71 percent, which was driven by rising prices on the Hotel and Restaurant subcomponents, which amounted to 6.36 percent.

The inflation rate of household consumption in 2020 was 2.53 percent, this means that there was an increase in prices in Sabang Regency for household consumption by 2.53 percent.

Tabel 3. 2 Laju Pertumbuhan Indeks Implisit Komponen Konsumsi Rumah Tangga (Persen), 2016-2020
Table 3. 2 Implicit Index Growth Rate of Household Consumption Components (Percent), 2016-2020

Komponen/Component	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4.56	4.71	3.75	3.32	2.53
a. Makanan, Minuman & Rokok	3.36	5.27	4.07	4.21	3.04
b. Pakaian & Alas Kaki	9.71	4.53	3.72	1.47	6.05
c. Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	5.46	3.13	3.46	2.35	1.74
d. Kesehatan & Pendidikan	7.49	4.57	3.58	1.15	1.59
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	4.76	3.83	2.80	1.39	0.57
f. Hotel & Restoran	9.26	6.36	2.40	3.01	2.41
g. Lainnya	7.60	3.12	2.68	4.72	3.02

* Angka sementara/Preliminary Figure

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure

3.2.4 Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan salah satu variabel makro ekonomi yang menggambarkan besarnya pendapatan yang dibelanjakan. Untuk memperoleh gambaran besarnya rata-rata konsumsi perorangan di suatu wilayah, perlu adanya nilai konsumsi rumah tangga perkapita.

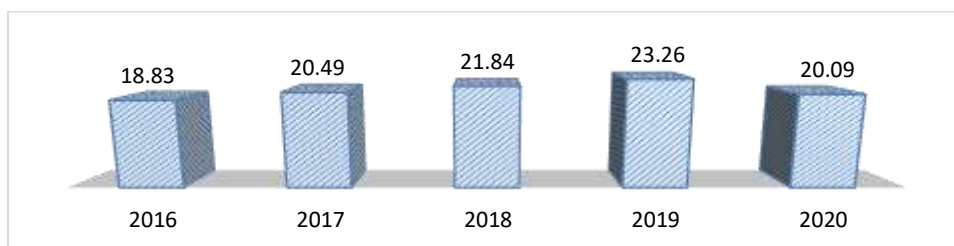
Nilai konsumsi rumah tangga perkapita di Kota Sabang dalam kurun waktu 2016-2020 terus meningkat kecuali pada tahun 2020 yang menunjukkan adanya penurunan. Tren tersebut mengindikasikan adanya peningkatan rata-rata daya beli penduduk yang juga berarti adanya peningkatan rata-rata pendapatan.

3.2.4 Consumption of households per capita

Household consumption expenditure is one of the macroeconomic variables that describes the amount of income spent. To get an idea of the average level of individual consumption in an area, there needs to be a value of per capita household consumption.

The value of per capita household consumption in Sabang City in the 2016-2020 period continues to increase except in 2020 which shows a decline. This trend indicates an increase in the average purchasing power of the population which also means an increase in average income.

Gambar 3. 10 Nilai Komponen Konsumsi Rumah Tangga Perkapita ADHB (Juta Rupiah), 2016-2020
Figure 3. 10 Value of Per Capita Household Consumption Components at Current Prices (Million Rupiah), 2016-2020



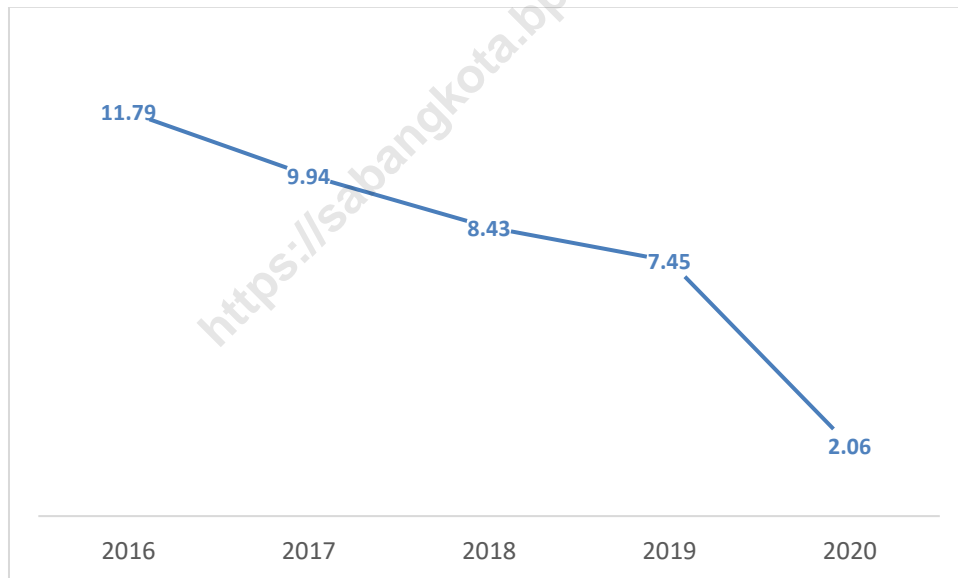
* Angka sementara/Preliminary Figure

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure

Selain pendapatan, peningkatan nilai konsumsi rumah tangga juga dipengaruhi oleh banyak faktor lain, diantaranya adalah tingkat inflasi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Nilai konsumsi perkapita pada tahun 2020 sebesar 20,09 juta rupiah menunjukkan bahwa pada tahun 2020, rata-rata konsumsi per penduduk Kota Sabang adalah sebesar 20,09 juta rupiah dalam satu tahun. Sedangkan jika dilihat dari laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga perkapita menunjukkan bahwa laju pertumbuhan konsumsi perkapita tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 11,79 persen.

Besides the income, the increase in the value of household consumption is also influenced by many other factors, including the level of inflation and changes in people's lifestyles. The value of public consumption in 2020 of 20.09 million rupiah shows that in 2020, the average consumption per resident Sabang City population was 20.09 million rupiah in one year. Whereas when viewed from the rate of growth of household consumption per capita shows that the highest rate of growth of household consumption per capita occurred in 2016 that is equal to 11.79 percent.

Gambar 3. 11 Laju Pertumbuhan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Perkapita ADHB (Persen), 2016-2020
Figure 3. 11 Growth Rate of Per Capita Household Consumption Components at Current Prices (Percent), 2016-2020



* Angka sementara/Preliminary Figure

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure

3.3 Konsumsi Lembaga Non-profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT)

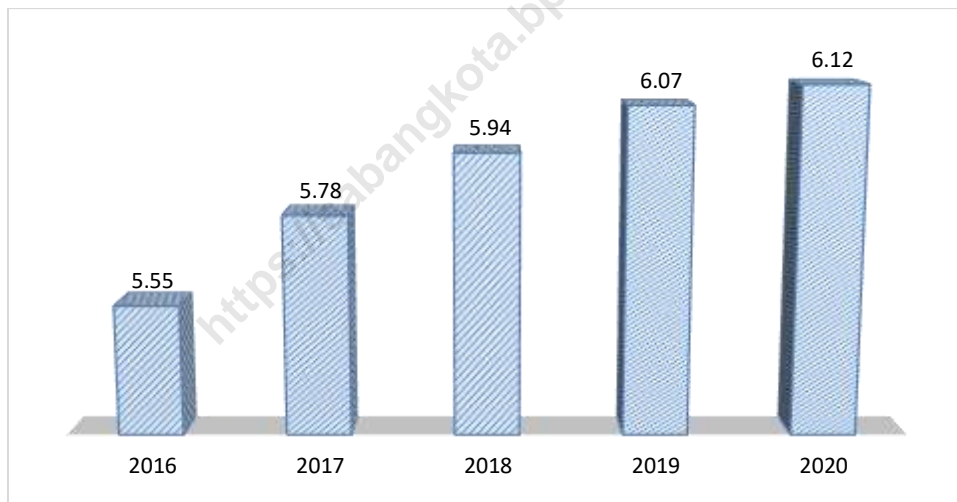
Peranan konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB Kota Sabang masih sangat kecil bila dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Meskipun terus mengalami peningkatan, dalam kurun waktu lima tahun (2016-2020) rata-rata kontribusi komponen ini masih kurang dari 10 persen. Sehingga belum bisa dikatakan bahwa komponen ini sebagai motor penggerak perekonomian Kota Sabang. Tercatat dari tahun 2016-2020 kontribusi tertinggi konsumsi LNPRT hanya sebesar 6,07 persen di tahun 2019.

3.3 Consumption of Non-profit Institutions that Serve Households (NPISH)

The role of final consumption of NPISH in the Sabang City GRDP is still very small when compared to other expenditure components. Even though it continues to increase, in the period of five years (2016-2020) the average contribution of this component is still less than 10 percent. So that it cannot be said that this component is the driving force of Sabang's economy. Recorded from 2016-2020 the highest contribution of NPISH consumption was only 6.07 percent in 2019.

Gambar 3. 12 Distribusi Persentase Komponen Konsumsi LNPRT ADHB (Persen), 2016-2020

Figure 3. 12 Percentage Distribution of Consumption Components of NPISH at Current Prices (Percent), 2016-2020



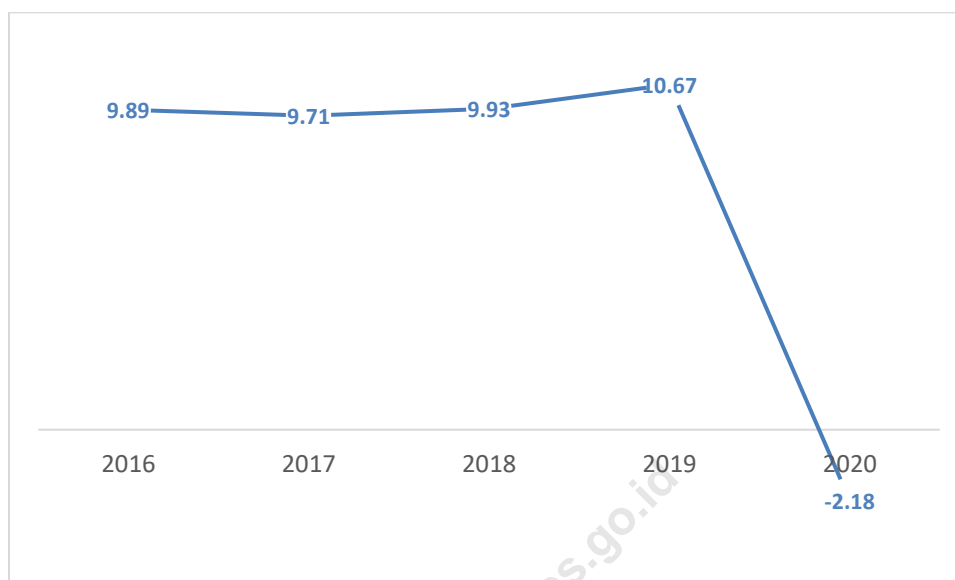
* Angka sementara/Preliminary Figure

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure

Meskipun kontribusinya terhadap PDRB rendah, namun komponen pengeluaran LNPRT masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, nilai pertumbuhan komponen pengeluaran LNPRT tertinggi berada pada tahun 2019, yaitu sebesar 10,67 persen. Ini menunjukkan adanya perkembangan yang positif terhadap aktifitas LNPRT di Kota Sabang. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya pemilihan umum pada tahun 2019.

Although its contribution to GRDP is low, however the NPISH expenditure component still showed positive growth. In the past five years, the highest growth value of NPISH expenditure component was in 2019, which was 10.67 percent. This shows a positive development of NPISH activities in Sabang City. This was mainly due to the general election in 2019.

Gambar 3. 13 Laju Pertumbuhan Komponen Konsumsi LNPRT ADHK 2010 (Persen), 2016-2020
Figure 3. 13 Growth Rate of NPISH Consumption Component at 2010 Constant Prices (Percent), 2015-2019



* Angka sementara/Preliminary Figure

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure

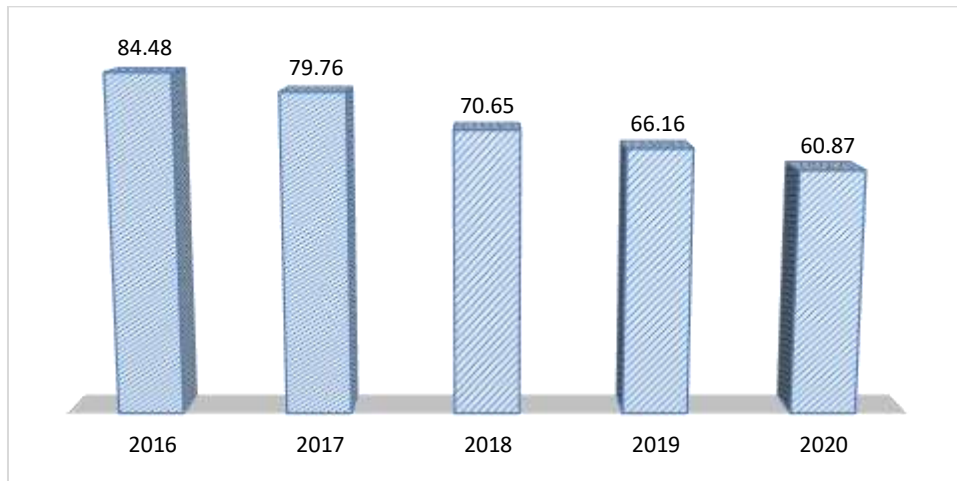
3.4 Konsumsi Pemerintah

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian. Konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kota Sabang memiliki peranan yang cukup besar dalam lima tahun terakhir, hal ini ditunjukkan dengan besarnya sumbangan komponen ini terhadap PDRB yang selalu di atas 50 persen. Kontribusi konsumsi pemerintah terjadi sedikit penurunan dari sebesar 84,48 persen pada tahun 2016 menjadi 79,76 persen pada tahun 2017. Pada tahun 2018 dan 2019, kembali terjadi penurunan kontribusi komponen ini menjadi sebesar 70,65 persen dan 66,16 persen. Hingga pada tahun 2020, kontribusinya menjadi sebesar 60,87 persen.

3.4 Government consumption

The final government consumption expenditure together with the final household expenditure and NPISH is the amount of final consumption in an economy. Government consumption in the economy of Sabang City has a significant role in the last five years, this is indicated by the large contribution of this component to GRDP which is always above 50 percent. The contribution of government consumption increased slightly from 84.48 percent in 2016 to 79.76 percent in 2017. In 2018 and 2019, the contribution of this component again decreased to 70.65 percent and 66.16 percent. Until 2020, its contribution was 60.87 percent.

Gambar 3. 14 Distribusi Persentase Komponen Konsumsi Pemerintah ADHB (Persen), 2016-2020
Figure 3. 14 Percentage Distribution of Government Consumption Components at Current Prices (Percent), 2016-2020

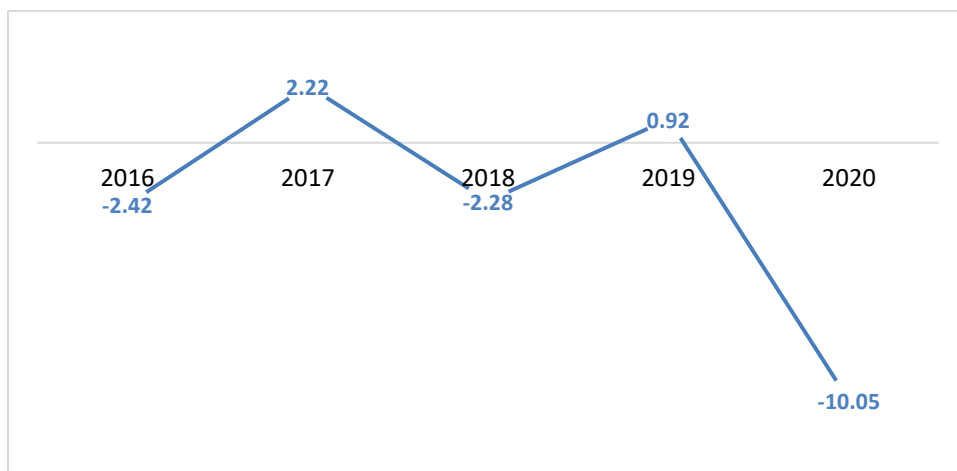


* Angka sementara/Preliminary Figure
 ** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure

Jika dilihat dari laju pertumbuhannya, komponen konsumsi pemerintah tumbuh dengan berfluktuatif. Pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2015 yaitu sebesar 5,7 persen sementara pertumbuhan paling lemah di tahun 2016 sebesar -2,42 persen. Sedangkan pada tahun 2019 tercatat pertumbuhan sebesar 0,92 persen.

When viewed from the rate of growth, the component of government consumption grew fluctuated. The highest growth was achieved in 2015 at 5,7 percent while the weakest growth in 2016 was -2,42 percent. Whereas in 2019 recorded growth of 0,92 percent.

Gambar 3. 15 Laju Pertumbuhan Komponen Konsumsi Pemerintah ADHK 2010 (Persen), 2016-2020
Figure 3. 15 Growth Rate of the 2010 Constant Prices of Government Consumption Component (Percent), 2016-2020



* Angka sementara/Preliminary Figure
 ** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure

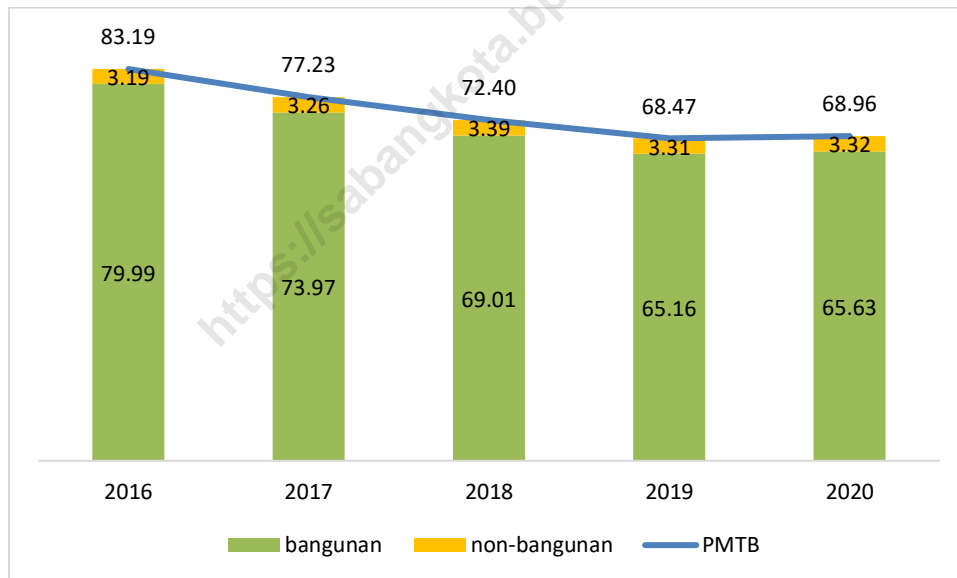
3.5. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen PMTB pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)². Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

3.5. Gross Fixed Capital Formation (GFCF)

The GFCF component in the GRDP according to expenditure explains more about the part of income that is realized into investment (physical). Or on a different side can also be interpreted as an illustration of various goods and services products which are partly used as physical investment (capital). The function of capital is as indirect input (indirect input) in the production process in various business fields. This capital can come from domestic production or from imports.

Gambar 3. 16 Distribusi Persentase Komponen PMTB ADHB (Persen), 2016-2020
Figure 3. 16 Percentage Distribution of GFCF at Current Prices (Percent) Components, 2016-2020



* Angka sementara/Preliminary Figure

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure

Pada tahun 2020, PMTB merupakan komponen dengan kontribusi terbesar kemudian posisi kedua adalah konsumsi pemerintah. Nilai kontribusi paling tinggi adalah di tahun 2016 yaitu sebesar 83,19 persen dan terendah di tahun 2019 yaitu sebesar 68,47 persen.

In 2020, PMTB was a component with the biggest contribution then the second position was government consumption component. The highest contribution value in 2016 is 86.13 percent and the lowest in 2019 is 68.47 percent.

² Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

²In addition to other parts that become intermediate consumption, final consumption, or exported

Jika dilihat berdasarkan subkomponen, PMTB bangunan memberikan kontribusi yang lebih besar bila dibandingkan dengan PMTB nonbangunan dengan besaran kontribusi pada tahun 2020 sebesar 65,63 persen.

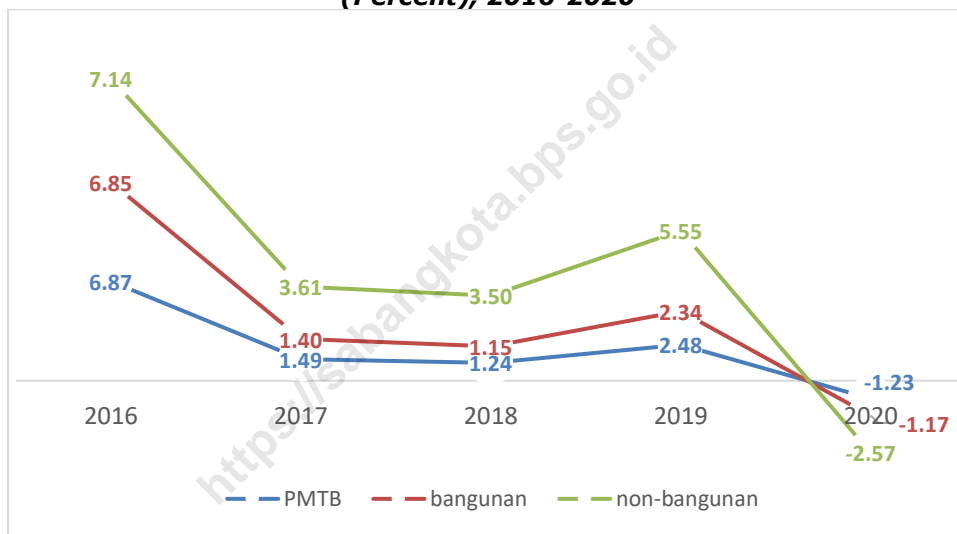
Selanjutnya, untuk laju pertumbuhan, dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan PMTB bangunan lebih stabil dibandingkan dengan non bangunan. Hal ini dikarenakan nilai PMTB bangunan sebagian besar bersumber dari dana anggaran pemerintah.

When viewed based on subcomponents, building GFCF gives a greater contribution when compared to building GFCF with the contribution of 2020 amounting to 65.63 percent.

Furthermore, for the growth rate, it can be seen that the growth rate of building GFCF is more stable compared to non-buildings. This is because the value of building GFCF is mostly sourced from government budget funds.

Gambar 3. 17 Laju Pertumbuhan Komponen PMTB ADHK 2010 (Persen), 2016-2020

Figure 3. 17 Growth Rate of 2010 GFCF Components at 2010 Constant Prices (Percent), 2016-2020



* Angka sementara/Preliminary Figure

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure

Laju pertumbuhan PMTB secara keseluruhan pada tahun 2020 bernilai negatif yaitu sebesar -1,23 persen, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 2,48 persen. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, laju pertumbuhan komponen ini mengalami trend yang berfluktuatif. Pada tahun 2020 bernilai negative dikarenakan selain efek pandemic yang menyebabkan beberapa proyek konstruksi tersendat juga karena selesainya proyek pembangunan Pelabuhan Balohan.

The overall growth rate of GFCF in 2019 was positive at 10.63 percent, a decrease compared to 2017 which was 8.05 percent. In the last five years, the growth rate of this component has experienced a fluctuating trend. The ever increasing growth indicates that more investment is taking place in Sabang. In 2019 for example there is a substantial investment in buildings, namely the construction of the Balohan Port which is planned as an international standard port.

<https://sabangkota.bps.go.id>

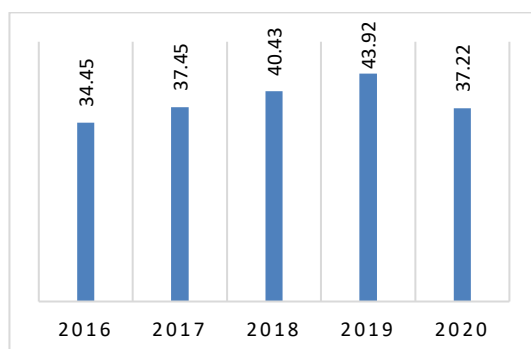
IV. PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGGUNAAN

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut beberapa rasio (perbandingan relatif):

4.1 PDRB Perkapita

PDRB perkapita Kota Sabang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2020. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Sabang rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar 37,22 juta rupiah di tahun 2020. Capaian ini menurun sebesar 6,7 persen jika dibandingkan capaian pada tahun sebelumnya yang sebesar 43,92 juta rupiah perkapita. Selama kurun waktu 2016-2020 telah terjadi peningkatan PDRB perkapita dari 34,45 juta rupiah perkapita pada tahun 2016 menjadi 37,22 juta rupiah perkapita pada tahun 2020. Sedangkan untuk pertumbuhan tertinggi tercatat terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 6,07 persen.

Gambar 4. 1 Nilai PDRB Perkapita ADHB (Juta Rupiah), 2016-2020
Figure 4. 1 Value of GRDP Per Capita at Current Prices (Million Rupiah), 2016-2020



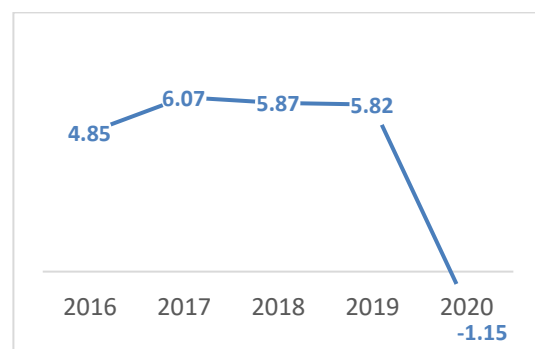
IV. DEVELOPMENT OF GRDP AGGREGATE BY USE

Various macroeconomic indicators commonly used in socioeconomic analysis can be derived from a set of PRDB data. Here are some ratios (relative comparison):

4.1 GRDP per Capita

The GRDP per capita of Sabang City shows an increase from year to year, except in 2020. This indicator shows that economically every resident of Sabang is able to create a GRDP or (added value) of 37.22 million rupiah in 2020 on average. 6.7 percent when compared to the previous year's achievement of 43.92 million rupiah per capita. During the 2016-2020 period, there was an increase in GDP per capita from 34.45 million rupiah per capita in 2016 to 37.22 million rupiah per capita in 2020. Meanwhile, the highest growth was recorded in 2017, which was 6.07 percent.

Gambar 4. 2 Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHK (Persen), 2016-2020
Figure 4. 2 Growth Rate of GRDP Per Capita at Constant Prices (Percent), 2016-2020



* Angka sementara/Preliminary Figure

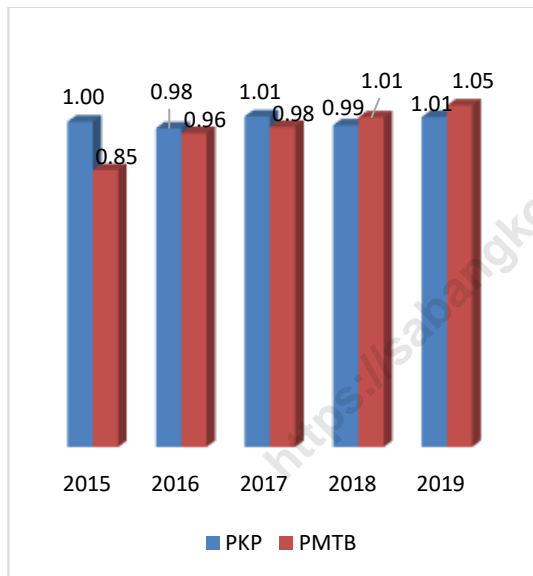
** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure

4.2 Perbandingan Konsumsi Pemerintah Terhadap PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir pemerintah dengan yang digunakan untuk investasi fisik (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB). Antara tahun 2015-2019, rasio konsumsi pemerintah terhadap PMTB cenderung menurun, dari sebesar 1,17 pada tahun 2015 menjadi 0,97 pada tahun 2019.

Gambar 4. 3 Nilai Komponen Konsumsi Pemerintah dan PMTB ADHB (Triliun Rp), 2015-2019

Figure 4. 3 Value of Government Consumption and GFCF Components (Trillions of Rp), 2015-2019



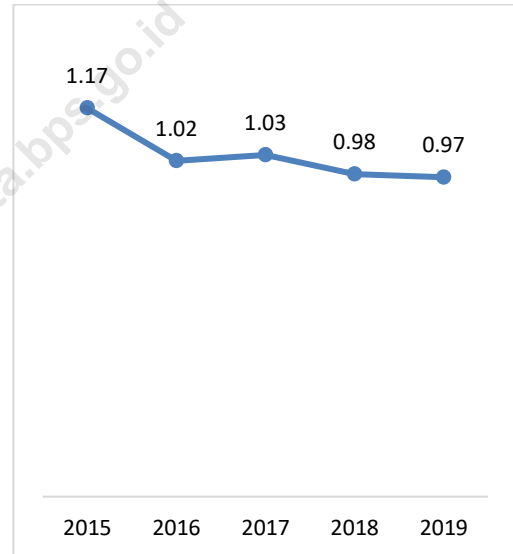
* Angka sementara/Preliminary Figure
 ** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure

4.3 Comparison of Government Consumption to GFCF

This ratio is a comparison between the products used for government final consumption and those used for physical investment (Gross Fixed Capital Formation/GFCF). Between 2015-2019, the ratio of government consumption to GFCF tended to decline, from 1,17 in 2015 to 0,97 in 2019.

Gambar 4. 4 Rasio Komponen Konsumsi Pemerintah dan PMTB ADHB (Triliun Rp), 2015-2019

Figure 4. 4 Ratio of Government Consumption Components to GFCF, 2015-2019

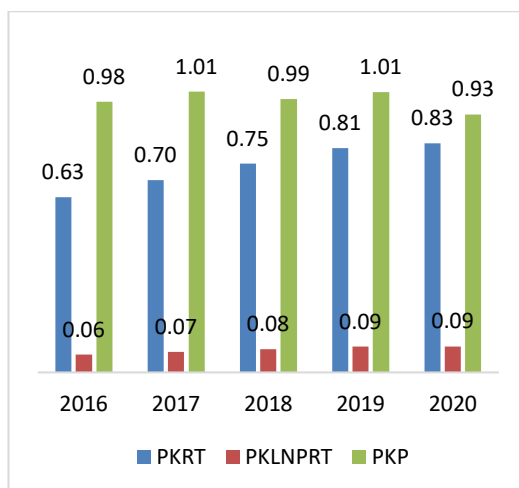


4.4 Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Secara umum, proporsi konsumsi akhir terhadap PDRB mengalami penurunan, dari sebesar 144,69 persen pada tahun 2016 menjadi 120,98 persen pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa investasi di Kota Sabang sudah mulai mengambil peran dalam sistem ekonomi. Angka proporsi yang menunjukkan angka lebih dari 100 dapat diartikan bahwa total PDRB Kota Sabang belum mampu untuk memenuhi konsumsi akhir, sehingga diperlukan impor dari daerah lain.

Gambar 4. 5 Nilai Komponen Konsumsi Akhir (Triliun Rp), 2016-2020
Figure 4. 5 Value of Final Consumption Components (Trillions of Rp), 2016-2020



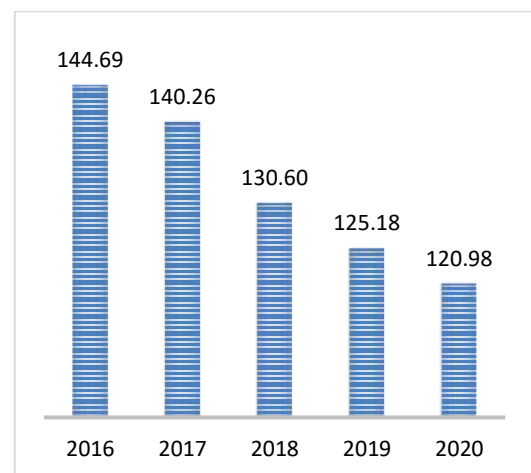
* Angka sementara/Preliminary Figure
 ** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure

4.4 Proportion of Total Final Consumption Expenditures to GRDP

The definition of final consumption is the use of various end products (both from domestic and imported products), for support economic activity. Final consumption actors include households, NPISH, and the government. Even though these three institutions have different functions in the economic system, they both spend a portion of their income for final consumption purposes.

In general, the proportion of final consumption to GRDP has decreased, from 144.69 percent in 2016 to 120.98 percent in 2020. This shows that investment in Sabang City has begun to take a role in the economist system. The number of proportions showing numbers over 100 can mean that the total GRDP of Sabang City has not been able to meet the final consumption, so that imports from other regions are needed.

Gambar 4.6 Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB (Persen), 2016-2020
Figure 4. 7 Proportions of Total Final Consumption Expenditures on GRDP (Percent), 2016-2020



<https://sabangkota.bps.go.id>

V. PENUTUP

1. PDRB menurut pengeluaran Kota Sabang tahun 2016-2020 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kota Sabang pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator social demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2016-2020, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.

V. CONCLUSION

1. *The GRDP according to Sabang City expenditure in 2016-2020 can describe changes in the structure and development of the economic conditions of Sabang City in the period concerned. Economic analysis in terms of expenditure GRDP will be different from business (industry) analysis which focuses more on production behavior. The expenditure GRDP analysis focuses on the use of final goods and services, both for the purpose of final consumption, investment (physical), and international and inter-regional trade. Four sector groups or economic actors who use the final goods and services in an economy are households, non-profit institutions that serve households / LNPRT, government, and companies.*
2. *This publication presents a simple analysis of consumption, investment and foreign trade behavior and trade between the regions in question. The analysis is based on indicators derived from expenditure GRDP. The analysis is also complemented by indicators of social demography (such as residents, households and civil servants), so the results of the analysis presented are more informative.*
3. *Data can be presented in the form of series data from 2016-2020, so that it is easy to describe changes or trends that occur between times. Each parameter is presented in different units (rupiah, index, percentage, ratio, unit, etc.) according to the purpose of the analysis and the characteristics of each data.*

4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variable ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.
 5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (external account) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor, dan transfer berjalan (current tranfer) neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Provinsi Aceh terhadap ekonomi negara lain (rest of the world).
4. *Data and indicators derived from GRDP data according to expenditure can be used as a reference for the development and expansion of other macroeconomic indicators such as disposable income, savings, and simple economic models that are interrelated between all available economic variables and variables. Even directly or indirectly can be associated with the display of other macroeconomic data such as GRDP according to business fields (industry), Input-Output Tables, Socio-Economic Balance Systems (SNSE) and even Fund Flow Balance.*
 5. *Some data on interactions with foreign countries (external accounts) in aggregate are presented here, such as exports and imports, and net current transfers. This external transaction illustrates the extent of Aceh Province's economic dependence on the rest of the world economy.*

<https://sabangkota.bps.go.id>

<https://sabangkota.bps.go.id>

LAMPIRAN ATTACHMENT

Lampiran 1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (juta rupiah), 2016-2020

Attachment 1 Gross Regional Domestic Product at Current Prices by Expenditures (million rupiah), 2016-2020

Komponen	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	633,267.31	696,195.73	754,874.12	811,080.38	827,772.18
a. Makanan, Minuman & Rokok	366,563.71	406,129.53	441,441.85	477,252.79	492,052.79
b. Pakaian & Alas Kaki	28,768.97	32,058.30	36,029.30	38,839.02	38,173.77
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	88,132.66	93,825.39	98,970.41	105,340.55	107,206.70
d. Kesehatan & Pendidikan	33,080.77	35,851.52	38,715.16	40,743.65	42,628.51
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	76,230.45	83,956.36	91,975.10	97,152.10	96,598.32
f. Hotel & Restoran	20,326.65	22,860.53	24,788.19	26,355.65	25,415.47
g. Lainnya	20,164.10	21,514.10	22,954.10	25,396.62	25,696.62
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	64,237.43	73,582.10	83,082.10	92,893.85	93,811.81
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	978,705.46	1,014,938.64	987,597.85	1,013,231.93	933,412.05
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	963,678.62	982,729.60	1,011,975.97	1,048,637.91	1,057,340.67
a. Bangunan	926,671.14	941,260.96	964,617.56	997,944.03	1,006,396.80
b. Non-Bangunan	37,007.48	41,468.64	47,358.40	50,693.87	50,943.87
5 Perubahan Inventori	13,357.58	60,167.86	114,993.07	88,225.32	37,482.68
6 Ekspor	499,506.40	546,701.27	572,417.15	637,772.28	617,772.28
7 Dikurangi Impor	1,994,307.59	2,101,848.75	2,127,142.81	2,160,254.57	2,034,254.57
P D R B	1,158,445.21	1,272,466.45	1,397,797.45	1,531,587.09	1,533,337.09

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

**Lampiran 2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran (juta rupiah), 2016-2020**

Komponen	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran	491,044.06	515,559.48	538,830.36	560,327.78	557,731.63
1 Konsumsi Rumah Tangga					
a. Makanan, Minuman & Rokok	295,983.83	311,514.52	325,344.80	337,543.64	337,743.64
b. Pakaian & Alas Kaki	19,065.18	20,324.31	22,023.31	23,396.27	21,684.58
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	68,102.53	70,299.22	71,676.73	74,541.14	74,564.94
d. Kesehatan & Pendidikan	24,331.70	25,218.33	26,291.42	27,353.40	28,172.11
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	55,700.62	59,080.45	62,959.45	65,588.91	64,845.03
f. Hotel & Restoran	13,094.65	13,845.88	14,660.88	15,133.08	14,250.00
g. Lainnya	14,765.54	15,276.77	15,873.77	16,771.33	16,471.33
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	50,620.51	55,535.27	61,047.27	67,562.30	66,086.36
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	694,343.06	709,778.94	693,585.91	699,955.17	629,589.55
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	744,593.63	755,663.85	765,039.11	783,984.43	774,315.48
a. Bangunan	715,329.13	725,343.62	733,658.64	750,861.70	742,042.76
b. Non-Bangunan	29,264.50	30,320.23	31,380.46	33,122.72	32,272.72
5 Perubahan Inventori	10,887.67	46,148.57	88,907.82	85,389.13	29,886.78
6 Ekspor	341,610.04	361,885.10	372,855.25	405,035.20	382,035.20
7 Dikurangi Impor	1,375,805.37	1,429,191.00	1,445,236.00	1,464,697.09	1,315,219.09
P D R B	957,293.60	1,015,380.21	1,075,029.71	1,137,556.92	1,124,425.92

* Angka sementara/*Preliminary Figures*

** Angka sangat sementara/*Very Preliminary Figures*

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 3 Distribusi Persentase Pengeluaran Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (persen), 2016-2020

Komponen	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	54.67	54.71	54.00	52.96	53.99
a. Makanan, Minuman & Rokok	31.64	31.92	31.58	31.16	32.09
b. Pakaian & Alas Kaki	2.48	2.52	2.58	2.54	2.49
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	7.61	7.37	7.08	6.88	6.99
d. Kesehatan & Pendidikan	2.86	2.82	2.77	2.66	2.78
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	6.58	6.60	6.58	6.34	6.30
f. Hotel & Restoran	1.75	1.80	1.77	1.72	1.66
g. Lainnya	1.74	1.69	1.64	1.66	1.68
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5.55	5.78	5.94	6.07	6.12
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	84.48	79.76	70.65	66.16	60.87
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	83.19	77.23	72.40	68.47	68.96
a. Bangunan	79.99	73.97	69.01	65.16	65.63
b. Non-Bangunan	3.19	3.26	3.39	3.31	3.32
5 Perubahan Inventori	1.15	4.73	8.23	5.76	2.44
6 Net Ekspor	(129.04)	(122.22)	(111.23)	(99.41)	(92.38)
P D R B	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

* Angka sementara/*Preliminary Figures*

** Angka sangat sementara/*Very Preliminary Figures*

Lampiran 4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (persen), 2016-2020

Komponen		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6.91	4.99	4.51	3.99	(0.46)
a.	Makanan, Minuman & Rokok	8.40	5.25	4.44	3.75	0.06
b.	Pakaian & Alas Kaki	6.19	6.60	8.36	6.23	(7.32)
c.	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	4.85	3.23	1.96	4.00	0.03
d.	Kesehatan & Pendidikan	3.78	3.64	4.26	4.04	2.99
e.	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	4.79	6.07	6.57	4.18	(1.13)
f.	Hotel & Restoran	4.94	5.74	5.89	3.22	(5.84)
g.	Lainnya	3.57	3.46	3.91	5.65	(1.79)
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9.89	9.71	9.93	10.67	(2.18)
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	(2.42)	2.22	(2.28)	0.92	(10.05)
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	6.87	1.49	1.24	2.48	(1.23)
a.	Bangunan	6.85	1.40	1.15	2.34	(1.17)
b.	Non-Bangunan	7.14	3.61	3.50	5.55	(2.57)
P D R B		4.85	6.07	5.87	5.82	(1.15)

* Angka sementara/*Preliminary Figures*

** Angka sangat sementara/*Very Preliminary Figures*

Lampiran 5 Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran (2010 = 100), 2016-2020

Komponen	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	128.96	135.04	140.09	144.75	148.42
a. Makanan, Minuman & Rokok	123.85	130.37	135.68	141.39	145.69
b. Pakaian & Alas Kaki	150.90	157.73	163.60	166.01	176.04
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	129.41	133.47	138.08	141.32	143.78
d. Kesehatan & Pendidikan	135.96	142.16	147.25	148.95	151.31
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	136.86	142.11	146.09	148.12	148.97
f. Hotel & Restoran	155.23	165.11	169.08	174.16	178.35
g. Lainnya	136.56	140.83	144.60	151.43	156.01
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	126.90	132.50	136.09	137.49	141.95
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	140.95	142.99	142.39	144.76	148.26
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	129.42	130.05	132.28	133.76	136.55
a. Bangunan	129.54	129.77	131.48	132.91	135.63
b. Non-Bangunan	126.46	136.77	150.92	153.05	157.85
P D R B	121.01	125.32	130.02	134.64	136.37

* Angka sementara/*Preliminary Figures*

** Angka sangat sementara/*Very Preliminary Figures*

Lampiran 6 Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran (persen), 2016-2020

Komponen		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.56	4.71	3.75	3.32	2.53
	a. Makanan, Minuman & Rokok	3.36	5.27	4.07	4.21	3.04
	b. Pakaian & Alas Kaki	9.71	4.53	3.72	1.47	6.05
	c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	5.46	3.13	3.46	2.35	1.74
	d. Kesehatan & Pendidikan	7.49	4.57	3.58	1.15	1.59
	e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	4.76	3.83	2.80	1.39	0.57
	f. Hotel & Restoran	9.26	6.36	2.40	3.01	2.41
	g. Lainnya	7.60	3.12	2.68	4.72	3.02
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4.86	4.41	2.72	1.03	3.24
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0.40	1.45	(0.42)	1.66	2.42
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	6.06	0.48	1.71	1.12	2.09
	a. Bangunan	6.15	0.17	1.32	1.08	2.05
	b. Non-Bangunan	3.81	8.15	10.34	1.41	3.14
PDRB		3.25	3.56	3.75	3.55	1.28

* Angka sementara/*Preliminary Figures*

** Angka sangat sementara/*Very Preliminary Figures*

<https://sabangkota.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
- _____, 1980-1990. Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri, Jakarta.
- _____, Implementasi SNA 2008 Dalam Penyusunan PDB Indonesia Tahun Dasar 2010, booklet, Jakarta.
- _____, Pendapatan Nasional Indonesia, berbagai seri, Jakarta.
- _____, Perubahan Tahun Dasar PDB Berbasis SNA 2008, booklet, Jakarta.
- _____, Statistik Industri, berbagai seri, Jakarta.
- _____, Statistik Listrik, Gas dan Air, berbagai seri, Jakarta.
- _____, Statistik Pertambangan Migas, berbagai seri, Jakarta.
- _____, Statistik Pertambangan Non Migas, berbagai seri, Jakarta.
- _____, Statistik Konstruksi, berbagai seri, Jakarta.
- _____, Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat, berbagai seri, Jakarta.
- _____, 2000. Statistik Keuangan BUMN dan BUMD, 1997, Jakarta.
- _____, 1999. Profil Ekonomi Rumah tangga 1998, Jakarta.
- Frenken Jim, 1992. How To Measure Tangible Capital Stocks, Netherlands.
- Host Poul, Madsen, 1979 Macroeconomic Accounts An Overview, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC.
- Keuning. J. Steven, 1988. An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta.
- United Nations, A System of National Accounts, Studies in Methods, Series F No.2 Rev.3, New York,
- _____, 1973. Input-Output Table and Analysis, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York,
- _____, 1986. Handbook of National Accounting for Production, Sources and Methods, Series F No. 39, New York,
- _____, 1988. Handbook of National Accounting, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 50, New York,
- _____, 2000. Link between Business Accounting and National Accounting, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 76, New York,
- Verbiest Piet, 1997. Investment Matrix, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta,
- Ward, Michael, 1976. The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries, Paris,
- World Bank, 1993. System of National Accounts 1993, Bahan Kursus, Washington DC,

<https://sabangkota.bps.go.id>

DATA MENCERDASKAN BANGSA

<https://sabangkota.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

KOTA SABANG

Jl. Teuku Umar No.28, Sabang

Telp. (0652) 21346 Email: bps1172@bps.go.id